



BAPEDALITBANG

Badan Perencanaan Daerah, Penelitian dan Pengembangan

LAPORAN KINERJA TAHUN 2022

KATA PENGANTAR

Assalamualaikum wr wb...

Segala puji dan syukur kita panjatkan kehadirat Allah, SWT dengan segala rahmat dan karunianya Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Badan Perencanaan Daerah, Penelitian dan Pengembangan Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2022 telah selesai disusun. Penyusunan LKjIP ini dimaksudkan untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan/kegagalan pelaksanaan target kinerja organisasi perangkat daerah dalam mencapai tujuan-tujuan dan sasaran-sasaran dengan strategi berupa kebijakan, program dan kegiatan yang telah ditetapkan dalam APBD Kabupaten Pesisir Selatan Tahun Anggaran 2022. Dengan tujuan sebagai perwujudan akuntabilitas instansi kepada pihak-pihak yang memberi mandat, terciptanya system pelaporan akuntabilitas yang dapat meningkatkan kepercayaan terhadap pemerintah dan meningkatkan kinerja instansi pemerintah dalam menjalankan misi serta diharapkan dapat terciptanya pemerintahan yang baik.

Akhirnya, diharapkan informasi kinerja dalam Laporan Kinerja Instansi Pemerintah ini dapat memberikan masukan yang berharga dan bermanfaat, serta sebagai umpan balik (feedback) untuk perbaikan manajemen dan peningkatan akuntabilitas kinerja guna mewujudkan pemerintahan yang baik "Good Local Governance" di Badan Perencanaan Daerah, Penelitian dan Pengembangan, dan ucapan terima kasih kepada semua pihak yang telah membantu dan memberikan bimbingan penyusunan LkjIP ini.

Painan, 27 Februari 2023

Kepala Badan Perencanaan Daerah,
Penelitian dan Pengembangan



HADI SUSILO, S.STP, M.Si

NIP. 19770522 199703 1 001

IKHTISAR EKSEKUTIF

Segala puji dan syukur kita panjatkan kehadirat Allah, SWT dengan segala rahmat dan karunianya Laporan Kinerja (LKjIP) Pemerintah Badan Perencanaan Daerah, Penelitian dan Pengembangan Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2022 telah selesai disusun..

Laporan Kinerja (LKjIP) Pemerintah Badan Perencanaan Daerah, Penelitian dan Pengembangan menyajikan informasi tentang ukuran keberhasilan atau kegagalan dalam pencapaian target kinerja dalam kurun waktu 1 (satu) tahun anggaran 2022

Pada Tahun Anggaran 2022 Badan Perencanaan Daerah, Penelitian dan Pengembangan sebagai salah satu Badan penyelenggara urusan Penunjang dengan alokasi dana sebesar Rp.6.650.191.099,- untuk mengelola sebanyak 4 program dan 14 kegiatan dengan 33 Sub kegiatan.

Hasil analisis dan evaluasi dari capaian indikator kinerja sasaran strategis yang telah diukur dalam Bab III, keberhasilan/ kegagalan Badan Perencanaan Daerah, Penelitian dan Pengembangan Kabupaten Pesisir Selatan dapat dilihat dari capaian indikator kinerja tahun 2022, sebagai berikut :

Tabel. 1

MISI 1 : Memperkuat Tata Kelola Pemerintahan yang bersih, efektif, demokratis dan transparan							
N O	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA		SATUAN	2022		
					TARGET	REALISASI	CAPAIAN
1.	Meningkatnya Kualitas Dokumen Perencanaan Pembangunan	1.	Peningkatan nilai SAKIP pada komponen perencanaan kinerja	Nilai	25	25 *	100 *

2.	Terwujudnya Kebijakan Pembangunan sesuai dengan kebutuhan Pembangunan	1.	Persentase Kebijakan Pembangunan yang searah dengan sasaran RPJMD	%	89,5	100	111,73
		2.	Indeks Inovasi Daerah	Tanpa Satuan	60,02	60,02*	100*
		3.	Inovasi Bapedalitbang	Jumlah	1	1	100
3.	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Bapedalitbang	1.	Hasil Penilaian AKIP Bapedalitbang oleh Inspektorat	Nilai	A	A*	A*

* Nilai sementara (tahun 2022)

- Hasil Penilaian SAKIP tahun 2022 belum ada dari Kemenpan RB
- Hasil Penilaian Inovasi Daerah tahun 2022 belum ada dari Kemendagri
- Hasil Penilaian AKIP tahun 2022 belum ada dari Inspektorat

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	i
IKHTISAR EKSEKUTIF	ii
DAFTAR ISI	iv
DAFTAR TABEL	v
DAFTAR GRAFIK	vii
BAB I PENDAHULUAN	Hal I- 1
1.1. Latar Belakang	Hal I- 1
1.2. Maksud dan Tujuan	Hal I- 2
1.3. Landasan Hukum	Hal I- 3
1.4. Gambaran Umum Badan Perencanaan Daerah, Penelitian dan Pengembangan	Hal I- 4
1.5. Struktur Organisasi	Hal I- 5
1.6. Sumber Daya Aparatur	Hal I- 15
1.7. Sistematika Penyajian	Hal I- 23
BAB II PERENCANAAN KINERJA DAN PERJANJIAN KINERJA	Hal II- 1
2.1. Rencana Strategis Badan Perencanaan Daerah, Penelitian dan Pengembangan Kabupaten Pesisir Selatan 2021-2026	Hal II- 1
2.2. Perjanjian Kinerja	Hal II- 3
2.3. Indikator Kinerja Utama	Hal II- 4
BAB III AKUNTABILITAS KINERJA	Hal III- 1
3.1. Metodologi Penilaian Capaian Target Kinerja Badan Perencanaan Daerah, Penelitian dan Pengembangan Kabupaten Pesisir Selatan	Hal III- 1
3.2. Hasil Pengukuran Kinerja	Hal III- 4
3.3. Capaian Kinerja Badan Perencanaan Daerah, Penelitian dan Pengembangan Kabupaten Pesisir Selatan	Hal III- 5
3.4. Akuntabilitas Keuangan	Hal III- 23
BAB IV PENUTUP	Hal IV- 1
4.1. Kesimpulan	Hal IV- 1
4.2. Saran	Hal IV- 2

DAFTAR TABEL

Tabel I	Ikhtisar Eksekutif
Tabel I.1	Komposisi aparatur/pegawai berdasarkan kepangkatan/golongan
Tabel I.2	Komposisi Aparatur/Pegawai Badan Perencanaan Daerah, Penelitian dan Pengembangan berdasarkan Jenjang Pendidikan
Tabel I.3	Sarana dan Prasarana Penunjang di Badan Perencanaan Daerah, Penelitian dan Pengembangan
Tabel II.1	Tujuan-Sasaran-Indikator
Tabel II.2	Perjanjian Kinerja Bapedalitbang Kab.Pessel Tahun 2022
Tabel II.3	Indikator Kinerja Utama Badan Perencanaan daerah, Peneitian dan Pengembangan
Tabel III.1	Klasifikasi Penilaian dan Kategori Penilaian Keberhasilan/Kegagalan Pencapaian Sasaran Strategis dan Capaian Indikator Kinerja Tahun 2022
Tabel III.2	Hasil Pengukuran Perjanjian Kinerja Badan Perencanaan Daerah, Penelitian dan Pengembangan Tahun 2022
Tabel III.3	Capaian Kinerja Sasaran 1 : Meningkatnya kualitas dokumen perencanaan pembangunan Tahun 2022
Tabel III.4	Realisasi dan Capaian Indikator kinerja Peningkatan nilai SAKIP pada komponen perencanaan kinerja Tahun 2020-2022
Tabel III.5	Program yang mendukung pencapaian target indikator kinerja yang di tetapkan
Tabel III.6	Capaian Kinerja Sasaran 2 : Persentase Kebijakan Pembangunan yang searah dengan Sasaran RPJMD, Indeks Inovasi Daerah dan Inovasi Bapedalitbang
Tabel III.7	Kebijakan Pembangunan yang searah dengan Sasaran RPJMD
Tabel III.8	Realisasi dan Capaian Indikator Kinerja Persentase Kebijakan pembangunan yang searah dengan sasaran RPJMD Tahun 2020-2022
Tabel III.9	Program yang mendukung pencapaian target indikator kinerja yang di tetapkan

Tabel III.10 Capaian Indikator Kinerja Sasaran Strategis 3

Tabel III.11 Aspek yang dinilai dalam evaluasi

Tabel III.12 Realisasi dan Capaian Indikator Kinerja Hasil Penilaian AKIP
Bapedalitbang oleh Inspektorat Tahun 2020-2022

Tabel III.13 Program yang mendukung pencapaian target indikator kinerja yang di
tetapkan

Tabel III.14 Anggaran dan Realisasi Anggaran Program/Kegiatan Yang
Menunjang Sasaran Strategis

DAFTAR GRAFIK

- Grafik I.1 Komposisi aparatur/pegawai berdasarkan jenis kelamin
- Grafik I.2 Komposisi aparatur/pegawai berdasarkan golongan ruang
- Grafik I.3 Komposisi Aparatur/Pegawai Badan Perencanaan Daerah, Penelitian dan Pengembangan berdasarkan Jenjang Pendidikan
- Grafik I.4.1 Komposisi Sarana dan Prasarana Penunjang Bangunan Gedung
- Grafik I.4.2 Komposisi Sarana dan Prasarana Penunjang Fasilitas Kantor
- Grafik I.4.3 Komposisi Sarana dan Prasarana Penunjang Kendaraan Dinas

BAB I PENDAHULUAN

I.1 LATAR BELAKANG

Dalam rangka penyelenggaraan Good Governance, diperlukan pengembangan dan penerapan sistem pertanggungjawaban yang tepat, jelas, terukur, dan syah sehingga penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan dapat berlangsung secara berdaya guna, bersih dan bertanggungjawab serta bebas dari korupsi, kolusi dan nepotisme. Untuk mewujudkan hal tersebut setiap instansi pemerintah sebagai unsur penyelenggaraan pemerintahan negara diwajibkan untuk mempertanggungjawabkan pelaksana tugas pokok dan fungsinya serta kewenangan pengelolaan sumber daya dengan didasarkan pada suatu perencanaan strategis yang ditetapkan oleh masing masing Instansi.

Secara umum Badan Perencanaan Daerah, Penelitian dan Pengembangan (Bapedalitbang) Kabupaten Pesisir Selatan mempunyai kedudukan sebagai unsur perencanaan pembangunan dalam penyelenggaraan pemerintah daerah. Kepala Bapedalitbang Kabupaten Pesisir Selatan berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah Kabupaten Pesisir Selatan. Tugas pokok Bapedalitbang Kabupaten Pesisir Selatan adalah melaksanakan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan daerah di bidang perencanaan pembangunan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan.

Kepala Bapedalitbang selaku Pengguna Anggaran harus menyusun dan menyampaikan laporan Kinerja kepada Bupati selambat-lambatnya 2 bulan setelah tahun anggaran berakhir. Laporan kinerja tersebut berisi ringkasan tentang keluaran dari masing-masing kegiatan dan hasil yang dicapai dari masing-masing program sebagaimana ditetapkan dalam dokumen pelaksanaan APBD Kabupaten Pesisir Selatan Tahun Anggaran 2022.

Pada Tahun Anggaran 2022, Badan Perencanaan Daerah, Penelitian dan Pengembangan sebagai salah satu Badan penyelenggara urusan Penunjang dengan alokasi dana sebesar Rp. 6.650.191.099,- yang merupakan belanja tidak langsung untuk mengelola sebanyak 4 program, 14 kegiatan dan 33 sub kegiatan. Dana program dan kegiatan prioritas yang diselenggarakan ini sesuai dengan PP No. 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Instansi Pemerintah dan PP No. 3 Tahun 2008 tentang Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah kepada Pemerintah. LKPJ Kepala Daerah kepada DPRD dan Informasi Laporan Penyelenggara Pemerintahan Daerah kepada DPRD kepada masyarakat paling lambat 3 bulan setelah tahun anggaran berakhir harus dilaporkan secara transparan dan akuntabel dalam bentuk LKjIP (Laporan Kinerja) Pemerintah Daerah.

I.2 MAKSUD DAN TUJUAN

- a. Memberikan gambaran tentang hasil pelaksanaan program dan kegiatan Badan Perencanaan Daerah Penelitian dan Pengembangan Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2022 sesuai dengan program, kegiatan dan sub kegiatan yang telah ditetapkan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2022 berikut rencana dan langkah operasional yang dilaksanakan.
- b. Memberikan acuan dan tolok ukur dalam rangka penilaian kinerja pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Badan Perencanaan Daerah Penelitian dan Pengembangan Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2022 sesuai dengan pendekatan prinsip anggaran kinerja yang mengacu kepada indikator-indikator Standar Kinerja program dan kegiatan yang ditetapkan.
- c. Memberikan acuan dalam rangka pengendalian dan pengawasan pelaksanaan program, kegiatan dan sub kegiatan selanjutnya, berikut memudahkan penilaian kinerja dan pertanggungjawaban

pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Badan Perencanaan Daerah Penelitian dan Pengembangan Kabupaten Pesisir Selatan.

Bapedalitbang dalam melaksanakan tugas tersebut mempunyai fungsi sebagai berikut :

1. Perumusan kebijakan teknis di bidang perencanaan pembangunan daerah, penelitian dan pengembangan;
2. perumusan kebijakan teknis bidang perencanaan pembangunan daerah dan bidang penelitian dan pengembangan;
3. penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah dan pelayanan umum bidang perencanaan pembangunan daerah dan bidang penelitian dan pengembangan;
4. perumusan pembinaan, pelaksanaan tugas, dan evaluasi bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia, bidang Perekonomian, Sumber Daya Alam, Infrastruktur dan Kewilayahan, bidang Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, serta bidang Penelitian dan Pengembangan;
5. pembinaan pengawasan dan pengendalian penggunaan anggaran Badan;
6. pembinaan, pengawasan dan pengendalian akuntabilitas kinerja instansi pemerintah;
7. pembinaan, pengawasan dan pengendalian produk hukum sesuai dengan bidang tugasnya;
8. penyelenggaraan administrasi kesekretariatan; dan
9. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh pimpinan.

I.3 LANDASAN HUKUM

- a . Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
- b . Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan

- Negara yang Bersih dan Bebas dari Kolusi, Korupsi dan Nepotisme;
- c . Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
 - d . Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2020 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
 - e . Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2021-2026;
 - f . Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 02 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah No. 8 tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah di Kabupaten Pesisir Selatan;
 - g . Peraturan Bupati Nomor 20 Tahun 2020 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Tahun 2021; dan
 - h . Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor 104 Tahun 2021 Tentang Rencana Strategis Badan Perencanaan Daerah, Penelitian dan Pengembangan Tahun 2021-2026
 - i . Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor 178 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Pokok, Fungsi, Tata Kerja, dan Uraian Tugas Jabatan Struktural Badan Perencanaan Daerah, Penelitian dan Pengembangan.

I.4 GAMBARAN UMUM BADAN PERENCANAAN DAERAH, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN

Badan Perencanaan Daerah, Penelitian dan Pengembangan Kabupaten Pesisir Selatan merupakan salah satu unsur pendukung urusan pemerintahan bidang perencanaan. Kepala Badan Perencanaan Daerah, Penelitian dan Pengembangan Kabupaten Pesisir Selatan dipimpin oleh seorang Kepala Badan yang bertanggung jawab kepada Bupati melalui

Sekretaris Daerah. Badan Perencanaan Daerah, Penelitian dan Pengembangan Kabupaten Pesisir Selatan dibentuk dengan Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 02 Tahun 2021 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Pesisir Selatan dan Peraturan Bupati Nomor 178 tahun 2021 tentang kedudukan, susunan organisasi, tugas pokok, fungsi, tata kerja dan uraian tugas jabatan struktural Badan Perencanaan Daerah, Penelitian dan Pengembangan Kabupaten Pesisir Selatan. Badan Perencanaan Daerah, Penelitian dan Pengembangan Kabupaten Pesisir Selatan berlokasi di Jalan Jenderal Sudirman, Desa Sago – Salido, Kecamatan IV Jurai.

Badan Perencanaan Daerah, Penelitian dan Pengembangan Kabupaten Pesisir Selatan sebagai lembaga teknis yang mempunyai tugas pokok dan fungsi dalam perumusan perencanaan pembangunan daerah memiliki peran dan fungsi strategis dalam perencanaan, pelaksanaan dan pengendalian pembangunan.

I.5 STRUKTUR ORGANISASI

Guna mendukung pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Badan Perencanaan Daerah, Penelitian dan Pengembangan Kabupaten Pesisir Selatan Tersebut, susunan organisasi dinas ditetapkan berdasarkan Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor 178 Tahun 2021 tentang kedudukan, susunan organisasi, tugas pokok, fungsi, tata kerja dan uraian tugas jabatan structural Badan Perencanaan Daerah, Penelitian dan Pengembangan Kabupaten Pesisir Selatan :

A. BADAN

Dalam melaksanakan tugas pokok di atas, Bapedalitbang menyelenggarakan fungsi sebagai berikut :

- a. Perumusan kebijakan teknis bidang perencanaan pembangunan daerah dan bidang penelitian dan pengembangan;
- b. Penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah dan pelayanan umum

- bidang perencanaan pembangunan daerah dan bidang penelitian dan pengembangan;
- c. Perumusan pembinaan, pelaksanaan tugas, dan evaluasi bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia, Bidang Perekonomian, Sumber Daya Alam, Infrastruktur dan Kewilayahan, Bidang Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, serta Bidang Penelitian dan Pengembangan;
 - d. Pembinaan pengawasan dan pengendalian penggunaan anggaran Badan;
 - e. Pembinaan, pengawasan dan pengendalian akuntabilitas kinerja instansi pemerintah;
 - f. Pembinaan, pengawasan dan pengendalian produk hukum sesuai dengan bidang tugasnya;
 - g. Penyelenggaraan administrasi kesekretariatan; dan
 - h. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh pimpinan.

Dalam melaksanakan fungsi sebagaimana yang dimaksud di atas Badan mempunyai tugas :

- a. membantu Bupati dalam melaksanakan kewenangan dibidang perencanaan pembangunan daerah serta bidang penelitian dan pengembangan;
 - b. memberikan data dan informasi mengenai pelayanan umum dibidang perencanaan daerah, penelitian dan pengembangan serta memberikan saran dan pertimbangan kepada Bupati sebagai bahan dalam mengambil keputusan;
 - c. memimpin, mengkoordinasikan, mengendalikan serta mengawasi semua kegiatan perencanaan pembangunan daerah, penelitian dan pengembangan;
 - d. melaksanakan konsultasi perencanaan dan pengendalian pelaksanaan pembangunan serta penelitian dan pengembangan;
 - e. mempertanggungjawabkan tugas Badan baik teknis operasional maupun fungsional kepada Bupati;
 - f. memelihara dan mengupayakan peningkatan kinerja pegawai, disiplin, loyalitas dan kejujuran;
 - g. membina unsur-unsur perencanaan daerah serta penelitian dan pengembangan dan mengembangkan tugas-tugas Badan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
 - h. menjalin kerjasama dengan PD dan instansi vertikal untuk kepentingan Badan dalam kelancaran pelaksanaan tugas;
 - i. melaksanakan tata usaha Badan dan pengelolaan unit pelaksana teknis serta memberikan pembinaan dan bimbingan terhadap kelompok jabatan fungsional;
 - j. mengusulkan penetapan pegawai dalam jabatan tertentu;
 - k. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh pimpinan.
-

B. Sekretariat

Sekretariat mempunyai tugas membantu Kepala Badan melaksanakan administrasi dan penatausahaan urusan umum, kepegawaian, keuangan dan pengkoordinasian program dan pelaporan Badan. Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud Sekretariat menyelenggarakan fungsi:

- a. mengkoordinasikan seluruh kegiatan Badan;
- b. mengoordinasikan dan menyusun rencana, program, dan anggaran Badan;
- c. mengoordinasikan pelaksanaan Musrenbang (RPJPD, RPJMD dan RKPD);
- d. menyusun kerangka regulasi dalam perencanaan pembangunan daerah pada Badan;
- e. membina dan memberikan dukungan administrasi yang meliputi ketatausahaan, kepegawaian, keuangan, kerumahtanggaan, kerja sama, hubungan masyarakat, arsip dan dokumentasi Badan;
- f. membina dan menata organisasi dan tata laksana;
- g. menyelenggarakan pengelolaan barang milik/kekayaan negara dan layanan pengadaan barang/jasa di lingkup Badan;
- h. mengoordinasikan, memantau, mengevaluasi, mengendalikan dan menilai atas capaian pelaksanaan rencana pembangunan daerah serta kinerja pengadaan barang/jasa milik negara; dan
- i. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh pimpinan.

B.1. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian.

Sub Bagian Umum dan Kepegawaian mempunyai tugas membantu Sekretaris melaksanakan pelayanan administrasi urusan persuratan, tata usaha, kearsipan, administrasi Aparatur Sipil Negara (ASN), perlengkapan/peralatan rumah tangga dan pengelolaan barang milik negara/daerah. Dalam melaksanakan tugas Sub Bagian Umum dan Kepegawaian mempunyai uraian tugas:

- a. menghimpun kebijakan teknis administrasi kepegawaian sesuai kebutuhan sebagai dasar pelaksanaan tugas;
- b. melaksanakan penyusunan rencana pengelolaan administrasi kepegawaian berdasarkan pedoman untuk kelancaran tugas unit;
- c. menyusun rencana kebutuhan pegawai sesuai formasi untuk optimalisasi pelaksanaan tugas unit;
- d. membuat usulan permintaan pegawai sesuai kebutuhan untuk kelancaran tugas unit;
- e. menyusun daftar induk kepegawaian sesuai petunjuk pelaksanaan/petunjuk teknis untuk tertibnya administrasi kepegawaian;
- f. melakukan pengelolaan administrasi kepegawaian melalui daftar induk kepegawaian dan nominatif untuk tertibnya administrasi kepegawaian;

- g. mengkonsultasikan pelaksanaan tugas dengan atasan, baik lisan maupun tertulis untuk memperoleh petunjuk lebih lanjut;
 - h. mengoordinasikan pelaksanaan tugas dengan para kepala sub bagian melalui rapat-rapat/pertemuan;
 - i. menyusun laporan pelaksanaan tugas secara berkala sebagai bahan evaluasi;
 - j. melakukan urusan surat menyurat, pelaksanaan kearsipan, pengelolaan urusan perlengkapan/peralatan rumah tangga, pengelolaan asset, dan pengelolaan administrasi kepegawaian;
 - k. menyusun analisis jabatan, analisis beban kerja, standar kompetensi jabatan, evaluasi jabatan standar operasional prosedur dan standar pelayanan minimal; dan
 - l. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh pimpinan.
- B.2 Kelompok Jabatan Fungsional Sub-Substansi Program.
Kelompok Jabatan Fungsional Sub-Substansi Program mempunyai tugas melaksanakan penyusunan rencana program/kegiatan tahunan, melakukan pelayanan administratif dalam menyiapkan bahan penyusunan dokumen perencanaan, serta menghimpun, mengolah dan mengevaluasi program, laporan akuntabilitas kinerja badan.
- B.3 Kelompok Jabatan Fungsional Sub-Substansi Keuangan.
Kelompok Jabatan Fungsional Sub-Substansi Keuangan mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan administrasi keuangan Badan.

C. Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia

- Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia mempunyai tugas membantu Kepala Badan dalam melaksanakan dan menyelenggarakan urusan dan pelaksanaan kebijakan di Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia. Untuk melaksanakan tugasnya Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia mempunyai fungsi:
- a. mengoordinasikan penyusunan dokumen perencanaan pembangunan daerah (RPJPD, RPJMD dan RKPD);
 - b. mengoordinasikan penyusunan Renstra PD dan Renja PD;
 - c. mengoordinasikan pelaksanaan Musrenbang (RPJPD, RPJMD dan RKPD);
 - d. mengoordinasikan pelaksanaan kesepakatan dengan DPRD terkait RPJPD, RPJMD dan RKPD;
 - e. mengoordinasikan pelaksanaan kesepakatan dengan DPRD terkait APBD;
 - f. mengoordinasikan sinergitas dan harmonisasi kegiatan PD;
 - g. mengoordinasikan pelaksanaan sinergitas dan harmonisasi kegiatan Kementerian/Lembaga di Provinsi dan Kabupaten/Kota;

- h. mengoordinasikan dukungan pelaksanaan kegiatan pusat untuk prioritas nasional;
- i. mengoordinasikan pelaksanaan kesepakatan bersama kerjasama antar daerah;
- j. mengoordinasikan pembinaan teknis perencanaan kepada PD;
- k. mengoordinasikan pelaksanaan monitoring dan evaluasi terhadap capaian kinerja PD sesuai dengan PD terkait;
- l. memberikan penilaian terhadap kinerja dan prestasi kerja bawahan berdasarkan capaian hasil kerja;
- m. pelaksanaan administrasi di bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia; dan
- n. melaksanakan fungsi lain yang diberikan oleh pimpinan.

C.1. Kelompok Jabatan Fungsional Sub_Subtansi Pemerintahan.

Kelompok Jabatan Fungsional Sub-Substansi Pemerintahan mempunyai tugas menyusun program/kegiatan, melaksanakan perumusan dan pelaksanaan penyusunan rancangan RPJPD, RPJMD, RKPD yang terkait unsur penunjang, unsur pengawas, unsur kewilayahan, unsur pemerintahan umum dan unsur pendukung urusan pemerintahan.

C.2. Kelompok Jabatan Fungsional Sub_Subtansi Pembangunan Manusia.

Kelompok Jabatan Fungsional Sub-Substansi Pembangunan Manusia mempunyai tugas merumuskan dan melaksanakan penyusunan rancangan RPJPD, RPJMD, RKPD terkait dengan urusan pemerintahan bidang pendidikan, urusan pemerintahan bidang kebudayaan, urusan pemerintahan bidang kesehatan, urusan pemerintahan bidang perpustakaan dan urusan pemerintahan bidang kearsipan.

C.3. Kelompok Jabatan Fungsional Sub_Subtansi Pemberdayaan dan Kependudukan. Kelompok Jabatan Fungsional Sub-Substansi Pemberdayaan dan Kependudukan mempunyai tugas merumuskan dan melaksanakan kebijakan penyusunan rancangan RPJPD, RPJMD, RKPD urusan pemerintah bidang sosial, urusan pemerintah bidang pemberdayaan perempuan dan anak, urusan pemerintah bidang kependudukan dan pencatatan sipil, urusan pemerintah bidang pemberdayaan masyarakat dan desa, urusan pemerintah bidang pengendalian penduduk dan keluarga berencana.

D. BIDANG PEREKONOMIAN, SUMBER DAYA ALAM, INFRASTRUKTUR DAN KEWILAYAHAN.

Bidang Perekonomian, Sumber Daya Alam, Infrastruktur dan Kewilayahan mempunyai tugas membantu Kepala Badan menyusun bahan kebijakan dan perencanaan teknis serta melaksanakan program/kegiatan dibidang Perekonomian, Sumber Daya Alam, Infrastruktur dan Kewilayahan. Untuk

melaksanakan tugas Bidang Perekonomian, Sumber Daya Alam, Infrastruktur dan Kewilayahan menyelenggarakan fungsi:

- a. mengoordinasikan penyusunan dokumen perencanaan pembangunan daerah (RPJPD, RPJMD dan RKPD);
- b. mengoordinasikan penyusunan Renstra dan Renja PD;
- c. mengoordinasikan pelaksanaan Musrenbang (RPJPD, RPJMD dan RKPD);
- d. mengoordinasikan pelaksanaan kesepakatan dengan DPRD terkait RPJPD, RPJMD dan RKPD;
- e. mengoordinasikan pelaksanaan kesepakatan dengan DPRD terkait APBD;
- f. mengoordinasikan sinergitas dan harmonisasi kegiatan PD;
- g. mengoordinasikan pelaksanaan sinergitas dan harmonisasi kegiatan Kementerian/Lembaga di Provinsi dan Kabupaten/Kota;
- h. mengoordinasikan dukungan pelaksanaan kegiatan pusat untuk prioritas nasional;
- i. mengoordinasikan pelaksanaan kesepakatan bersama kerjasama antar daerah;
- j. mengoordinasikan pembinaan teknis perencanaan kepada PD;
- k. mengoordinasikan pelaksanaan monitoring dan evaluasi terhadap capaian kinerja PD sesuai dengan PD terkait;
- l. memberikan penilaian terhadap kinerja dan prestasi kerja bawahan berdasarkan capaian hasil kerja;
- m. pelaksanaan administrasi dibidang Perekonomian, Sumber Daya Alam, Infrastruktur dan Kewilayahan; dan
- n. melaksanakan fungsi lain yang diberikan oleh pimpinan.

D.1. Kelompok Jabatan Fungsional Sub-Substansi Perekonomian

Kelompok Jabatan Fungsional Sub-Substansi Perekonomian mempunyai tugas melaksanakan penyusunan rancangan RPJPD, RPJMD, RKPD urusan pemerintah bidang koperasi, usaha kecil dan menengah, urusan pemerintah bidang tenaga kerja, urusan pemerintah bidang penanaman modal, urusan pemerintah bidang pariwisata, urusan pemerintah bidang kepemudaan dan olahraga, urusan pemerintah bidang perdagangan, urusan pemerintah bidang transmigrasi, dan urusan pemerintah bidang perindustrian.

D.2. Kelompok Jabatan Fungsional Sub-Substansi Infrastruktur dan Kewilayahan

Kelompok Jabatan Fungsional Sub-Substansi Infrastruktur dan Kewilayahan mempunyai tugas melaksanakan penyusunan rancangan RPJPD, RPJMD, RKPD urusan pemerintah bidang pekerjaan umum, urusan pemerintah bidang perumahan rakyat dan kawasan permukiman, urusan pemerintah bidang pertanahan, urusan pemerintah bidang lingkungan hidup, urusan pemerintah bidang

perhubungan, urusan pemerintah bidang komunikasi dan informatika, urusan pemerintah bidang statistik, dan urusan pemerintah bidang persandian.

D.3. Kelompok Jabatan Fungsional Sub-Substansi Pangan dan Sumber Daya Alam

Kelompok Jabatan Fungsional Sub-Substansi Pangan dan Sumber Daya Alam mempunyai tugas melaksanakan penyusunan rancangan RPJPD, RPJMD, RKPD urusan pemerintah bidang pertanian, urusan pemerintah bidang kelautan dan perikanan, urusan pemerintah bidang pangan, urusan pemerintah bidang ketentraman dan ketertiban umum serta perlindungan masyarakat, urusan pemerintah bidang kehutanan dan urusan pemerintah bidang energi dan sumber daya mineral.

E. BIDANG PERENCANAAN, PENGENDALIAN DAN EVALUASI PEMBANGUNAN DAERAH

Bidang Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah mempunyai tugas membantu Kepala Badan menyusun bahan kebijakan dan perencanaan teknis, merencanakan, melaksanakan, mengkoordinasikan, memfasilitasi, mengendalikan program/kegiatan dibidang perencanaan, pengendalian dan evaluasi pembangunan daerah. Untuk melaksanakan tugas Bidang Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah menyelenggarakan fungsi:

- a. melakukan analisa dan pengkajian perencanaan dan pendanaan pembangunan daerah;
- b. melakukan analisa dan pengkajian kewilayahan;
- c. melakukan pengumpulan dan analisis data dan informasi pembangunan untuk perencanaan pembangunan daerah;
- d. pengintegrasian dan harmonisasi program-program pembangunan di daerah;
- e. perumusan kebijakan penyusunan perencanaan, pengendalian, evaluasi dan informasi pembangunan daerah;
- f. mengoordinasikan dan mengsinkronisasikan pelaksanaan kebijakan perencanaan dan penganggaran di daerah;
- g. melakukan evaluasi terhadap kebijakan perencanaan pembangunan daerah, dan pelaksanaan rencana pembangunan daerah, serta hasil rencana pembangunan daerah;
- h. melakukan pengendalian melalui pemantauan, supervisi dan tindak lanjut penyimpangan terhadap pencapaian tujuan agar program dan kegiatan sesuai dengan kebijakan pembangunan daerah;
- i. mengidentifikasi permasalahan pembangunan daerah berdasarkan data untuk mengetahui perkembangan pembangunan;

- j. menyajikan dan mengamankan data informasi pembangunan daerah;
- k. melakukan pengamanan data melalui bahan cetak dan elektronik sebagai bahan dokumentasi;
- l. penyusunan evaluasi dan pelaporan program dan kegiatan pembangunan daerah;
- m. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan program dan kegiatan pembangunan daerah;
- n. pengelolaan hasil analisis hasil evaluasi untuk penyiapan pelaporan program dan kegiatan pembangunan daerah;
- o. penyusunan hasil evaluasi dan laporan pelaksanaan program pembangunan daerah; dan
- p. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh pimpinan.

E.1 Kelompok Jabatan Fungsional Sub-Substansi Perencanaan dan Pendanaan.

Kelompok Jabatan Fungsional Sub-Substansi Perencanaan dan Pendanaan mempunyai tugas merencanakan, mengelola, mengkoordinasikan, mengendalikan, mengevaluasi dan memonitoring urusan perencanaan terkait perencanaan dan pendanaan.

E.2 Kelompok Jabatan Fungsional Sub-Substansi Data dan Informasi.

Kelompok Jabatan Fungsional Sub-Substansi Data dan Informasi mempunyai tugas merencanakan, mengelola, mengkoordinasikan, mengendalikan, mengevaluasi dan melaporkan urusan pemerintahan terkait data dan informasi.

E.3 Kelompok Jabatan Fungsional Sub-Substansi Pengendalian, Evaluasi dan Pelaporan

Kelompok Jabatan Fungsional Sub-Substansi Pengendalian, Evaluasi dan Pelaporan mempunyai tugas melaksanakan perumusan dan pelaksanaan penyusunan rancangan RPJPD, RPJMD, RKPD terkait sub bidang pengendalian dan evaluasi pembangunan daerah.

F. BIDANG PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN

Bidang Penelitian dan Pengembangan mempunyai tugas membantu Kepala Badan melaksanakan penelitian dan pengembangan dibidang penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Pemerintah Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Untuk melaksanakan tugas Bidang Penelitian dan Pengembangan menyelenggarakan fungsi :

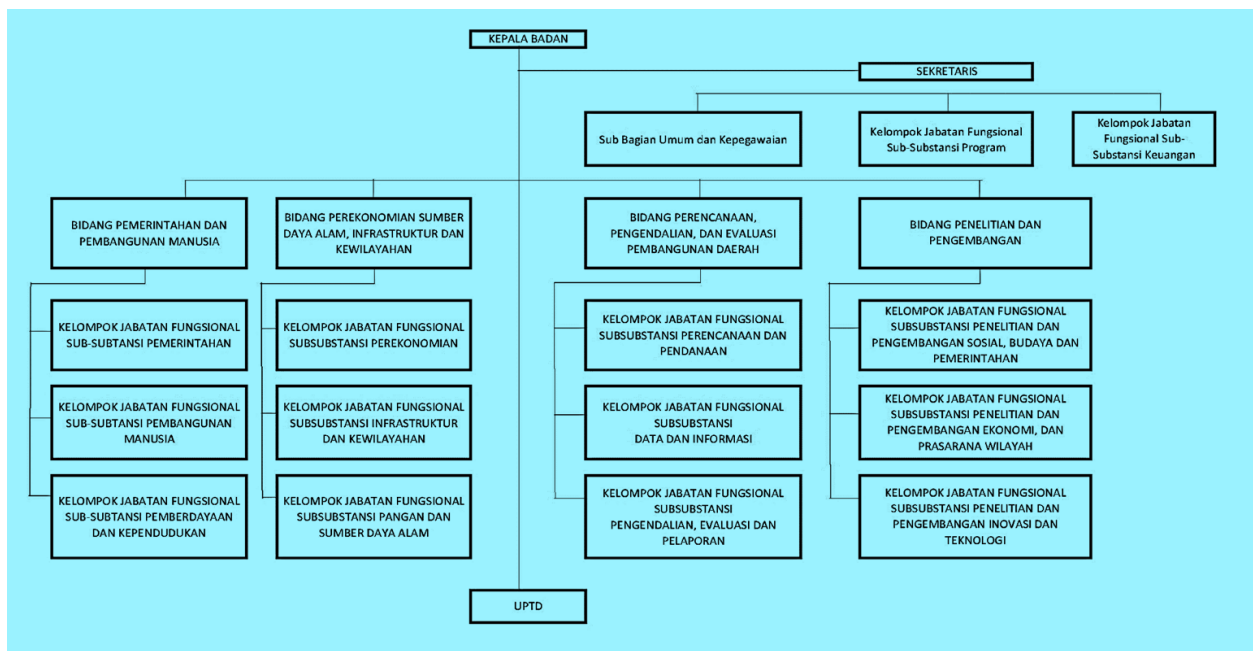
- a. penyusunan kebijakan teknis penelitian dan pengembangan Pemerintah Daerah;
- b. penyusunan perencanaan program dan anggaran penelitian dan pengembangan Pemerintahan Daerah;

- c. pelaksanaan penelitian dan pengembangan di Pemerintah Daerah;
 - d. pelaksanaan pengkajian kebijakan lingkup urusan Pemerintah Daerah;
 - e. fasilitasi dan pelaksanaan inovasi daerah;
 - f. pemantauan, evaluasi dan pelaporan atas pelaksanaan penelitian dan pengembangan di Daerah;
 - g. koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan penelitian dan pengembangan lingkup Pemerintah Daerah;
 - h. memantau serta mengevaluasi realisasi pelaksanaan kegiatan Bidang untuk mengetahui perkembangan, hambatan dan permasalahan yang timbul serta upaya tindak lanjut penyelesaiannya;
 - i. memberikan penilaian terhadap kinerja dan prestasi kerja bawahan berdasarkan capaian hasil kerja;
 - j. pelaksanaan administrasi bidang penelitian dan pengembangan daerah; dan
 - k. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh pimpinan.
- E.1. Kelompok Jabatan Fungsional Sub-Substansi Penelitian dan Pengembangan Sosial, Budaya dan Pemerintahan.
Kelompok Jabatan Fungsional Sub-Substansi Penelitian dan Pengembangan Sosial, Budaya dan Pemerintahan mempunyai tugas merencanakan, mengelola, mengoordinasikan, pengendalian, mengevaluasi dan melaporkan menyiapkan bahan penyusunan kebijakan teknis, program dan anggaran penelitian dan pengembangan Bidang Penelitian dan Pengembangan Sosial, Budaya dan Pemerintahan.
- E.2. Kelompok Jabatan Fungsional Sub-Substansi Penelitian dan Pengembangan Ekonomi dan Prasarana Wilayah.
Kelompok Jabatan Fungsional Sub-Substansi Penelitian dan Pengembangan Ekonomi dan Prasarana Wilayah mempunyai tugas merencanakan, mengelola, menkoordinasikan, mengendalikan, mengevaluasi dan melaporkan, menyiapkan bahan penyusunan kebijakan teknis, program dan anggaran penelitian dan pengembangan Bidang Penelitian dan Pengembangan Ekonomi dan Prasarana Wilayah.
- E.3. Kelompok Jabatan Fungsional Sub-Substansi Penelitian dan Pengembangan Inovasi dan Teknologi.
Kelompok Jabatan Fungsional Sub-Substansi Penelitian dan Pengembangan Inovasi dan Teknologi mempunyai tugas merencanakan, mengelola, menkoordinasikan, mengendalikan, mengevaluasi dan melaporkan menyiapkan bahan penyusunan kebijakan teknis, program dan anggaran penelitian dan pengembangan Bidang Penelitian dan Pengembangan Inovasi dan Teknologi.

Untuk melaksanakan tugas pokok dan fungsi tersebut diatas, Bapedalitbang terdiri dari 5 (lima) Bidang, 1 (satu) Sub-Bagian, dan Jabatan Fungsional dengan susunan organisasi sebagai berikut :

- 1) Sekretariat
 - a. Sub-Bagian Umum dan Kepegawaian
 - b. Kelompok Jabatan Fungsional Sub-Substansi Program
 - c. Kelompok Jabatan Fungsional Sub-Substansi Keuangan
- 2) Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia
 - a. Kelompok Jabatan Fungsional Sub-Substansi Pemerintahan
 - b. Kelompok Jabatan Fungsional Sub-Substansi Pembangunan Manusia
 - c. Kelompok Jabatan Fungsional Sub-Substansi Pemberdayaan dan Kependudukan
- 3) Bidang Perekonomian, Sumber Daya Alam, Infrastruktur, dan Kewilayahan
 - a. Kelompok Jabatan Fungsional Sub-Substansi Perekonomian
 - b. Kelompok Jabatan Fungsional Sub-Substansi Sumber Daya Alam dan Pangan
 - c. Kelompok Jabatan Fungsional Sub-Substansi Infrastruktur dan Kewilayahan
- 4) Bidang Perencanaan Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah
 - a. Kelompok Jabatan Fungsional Sub-Substansi Perencanaan dan Pendanaan
 - b. Kelompok Jabatan Fungsional Sub-Substansi Data dan Informasi
 - c. Kelompok Jabatan Fungsional Sub-Substansi Pengendalian, Evaluasi dan Pelaporan
- 5) Bidang Penelitian dan Pengembangan
 1. Kelompok Jabatan Fungsional Sub-Substansi Penelitian dan Pengembangan Sosial, Budaya dan Pemerintahan
 2. Kelompok Jabatan Fungsional Sub-Substansi Penelitian dan Pengembangan Ekonomi dan Prasarana Wilayah
 3. Kelompok Jabatan Fungsional Sub-Substansi Penelitian dan Pengembangan Inovasi dan Teknologi

Gambar 1.1 Struktur Organisasi dan Tata Kerja Badan Perencanaan Daerah, Penelitian dan Pengembangan Kabupaten Pesisir Selatan



(Sumber : Peraturan Bupati Pesisir Selatan nomor 178 Tahun 2021).

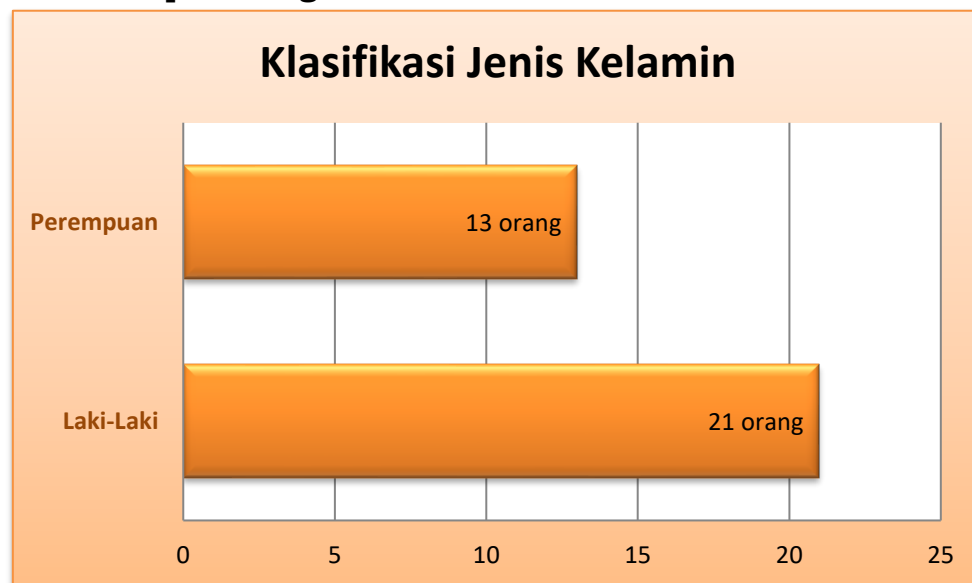
I.6 SUMBER DAYA APARATUR

Sumber daya aparatur Badan Perencanaan Daerah, Penelitian dan Pengembangan pada tahun 2022 dengan perincian sebagai berikut :

1. Jumlah Pegawai Negeri Sipil

Bapedalitbang Kabupaten Pesisir Selatan memiliki SDM yang cukup beragam. Jumlah SDM-PNS Kabupaten Pesisir Selatan per 30 Desember 2022 sebanyak 34 orang, terdiri dari 21 orang atau 61,8% Laki-laki dan 13 orang atau 38,3 % Perempuan, hal ini menunjukkan bahwa perimbangan gender yang baik sebagaimana nampak dalam gambar berikut ini :

Grafik.1.1
Komposisi Pegawai berdasarkan Jenis Kelamin



Sumber : Bezzeting Bapedalitbang 30 Desember 2022.

2. **Kepangkatan / golongan :**

Komposisi Aparatur/pegawai Badan Perencanaan Daerah, Penelitian dan Pengembangan berdasarkan Kepangkatan/Golongan dapat dilihat pada tabel berikut ini :

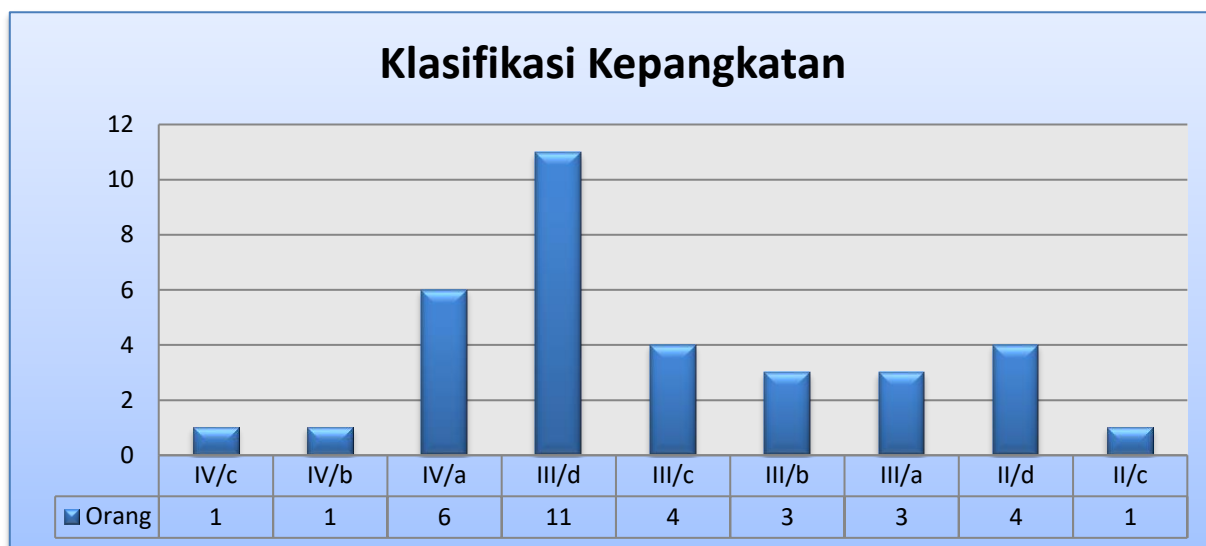
Tabel. 1.1
Komposisi ASN Bapedalitbang berdasarkan Kepangkatan/Golongan

No	Kepangkatan / Golongan	Jumlah PNS
1	Pembina Utama Muda (IV/c)	1 orang
2	Pembina Tingkat I (IV/b)	1 orang
3	Pembina (IV/a)	6 orang
4	Penata Tingkat I (III/d)	11 orang
5	Penata (III/c)	4 orang
6	Penata Muda Tingkat I (III/b)	3 orang
7	Penata Muda (III/a)	3 orang
8	Pengatur TK I (II/d)	4 orang
9	Pengatur (II/c)	1 orang

Sumber : Bezzeting Bapedalitbang 30 Desember 2022.

Komposisi Aparatur/pegawai Badan Perencanaan Daerah, Penelitian dan Pengembangan berdasarkan jenjang kepangkatan dan Golongannya juga dapat dilihat dalam grafik berikut ini :

Grafik.1.2
Komposisi Pegawai berdasarkan Golongan Ruang



Sumber : Bezetting Bapedalitbang Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2022.

Berdasarkan Tabel 1.1. dan grafik 1.1 di atas, jumlah pegawai berdasarkan pangkat dan golongan dari total keseluruhan pegawai, didominasi oleh golongan dan pangkat III d, (Penata Tk.I) sebanyak 11 orang, golongan dan pangkat IV a (Pembina) yaitu berjumlah 6 orang atau masing – masing 32,35 % dan 17,65 % dari seluruh jumlah pegawai. Sementara untuk golongan dan pangkat IV b (pembina TK I) dan II c (pengatur) saat ini masing ada 1. Sejalan dengan tugas dan fungsinya, disamping sumber daya manusia, perlengkapan juga menjadi syarat mutlak dalam menunjang, mendorong serta memfasilitasi kinerja serta dalam mekanisme pencapaian target kinerja berdasarkan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2021-2026.

3. Jenjang Pendidikan

Komposisi Aparatur Badan Perencanaan Daerah, Penelitian dan Pengembangan berdasarkan tingkat Pendidikan dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel. 1.3

Komposisi Aparatur/Pegawai Badan Perencanaan Daerah, Penelitian dan Pengembangan berdasarkan Jenjang Pendidikan

No	Jenjang Pendidikan	Jumlah
1	Tamat SLTA	4 orang
2	Diploma III	1 orang
3	Sarjana	18 orang
4	Pasca Sarjana	11 orang

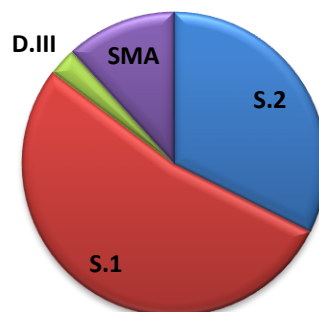
Sumber : Bezetting Bapedalitbang Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2022.

Komposisi Aparatur/Pegawai Badan Perencanaan Daerah, Penelitian dan Pengembangan berdasarkan tingkat pendidikan juga dapat dilihat dalam grafik berikut ini :

Grafik.1.3.

Komposisi Pegawai Badan Perencanaan Daerah, Penelitian dan Pengembangan **berdasarkan Jenjang Pendidikan**

Klasifikasi Pendidikan



Sumber : Bezetting Bapedalitbang Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2022.

Berdasarkan grafik di atas, untuk klasifikasi tingkat pendidikan Strata 2 (S2) berjumlah 11 orang atau proporsinya sebesar 31 % dari seluruh jumlah pegawai. Strata 1 (S1) mendominasi tingkat pendidikan pegawai yakni sebanyak 18 orang dengan proporsi 53 % dari keseluruhan jumlah pegawai, untuk D III sebanyak 1 orang dan untuk klasifikasi SMA sederajat berjumlah 4 orang dengan proporsi 14 % dari seluruh jumlah pegawai.

4. Sarana dan Prasarana Penunjang

Sarana dan prasarana penunjang dalam pelaksanaan tugas di Badan Perencanaan Daerah, Penelitian dan Pengembangan (Bapedalitbang), adalah sebagai berikut:

Tabel 1.3
Sarana dan Prasarana Penunjang di Badan Perencanaan Daerah, Penelitian dan Pengembangan

No	Nama Barang	Jumlah (unit)	Kondisi
A.	<u>Bangunan Gedung</u>		
1.	Gedung Kantor	2	Baik
2.	Pagar Gedung Kantor	1	Baik
3.	Bangunan Parkir Roda 4 dan Roda 2	3	Baik
4.	Ruangan Genset	1	Baik
5.	Bangunan Merk Kantor	1	Baik
B.	<u>Fasilitas Kantor</u>		
1.	Ruang Tempat Ibadah	1	Baik
2.	Ruang Rapat	2	Baik
3.	Ruang Kepala	1	Baik
4.	Ruang Sekretaris	1	Baik

5.	Ruang Kepala Bidang	4	Baik
6.	Ruang Keuangan	1	Baik
7.	Meja Kerja	59	Baik
8.	Meja Rapat	23	Baik
9.	Kursi Tamu	6	Baik
10.	Kursi Kerja	25	Baik
11.	Kursi Rapat	6	Baik
12.	Sofa Tamu	2	Baik
13.	Mesin Fax	1	Baik
14.	Komputer/PC	15	Baik
15.	Proyektor/Infocus	8	Baik
16.	GPS	5	Baik
17.	Alat penghancur kertas	2	Baik
18.	UPS	4	Baik
19.	Mesin potong rumput	2	Baik
20.	Genset	3	Baik
21.	Lemari Besi	20	Baik
22.	Filling Kabinet	5	Baik
23.	AC	32	Baik
24.	Lemari piring	2	Baik
25.	Wireless outdoor	3	Baik
26.	Laptop	20	Baik
27.	IPAD	5	Baik
28.	Hard Disk External	7	Baik
29.	Printer	26	Baik
30.	Software/ Aplikasi	3	Baik
31.	Drone	1	Baik

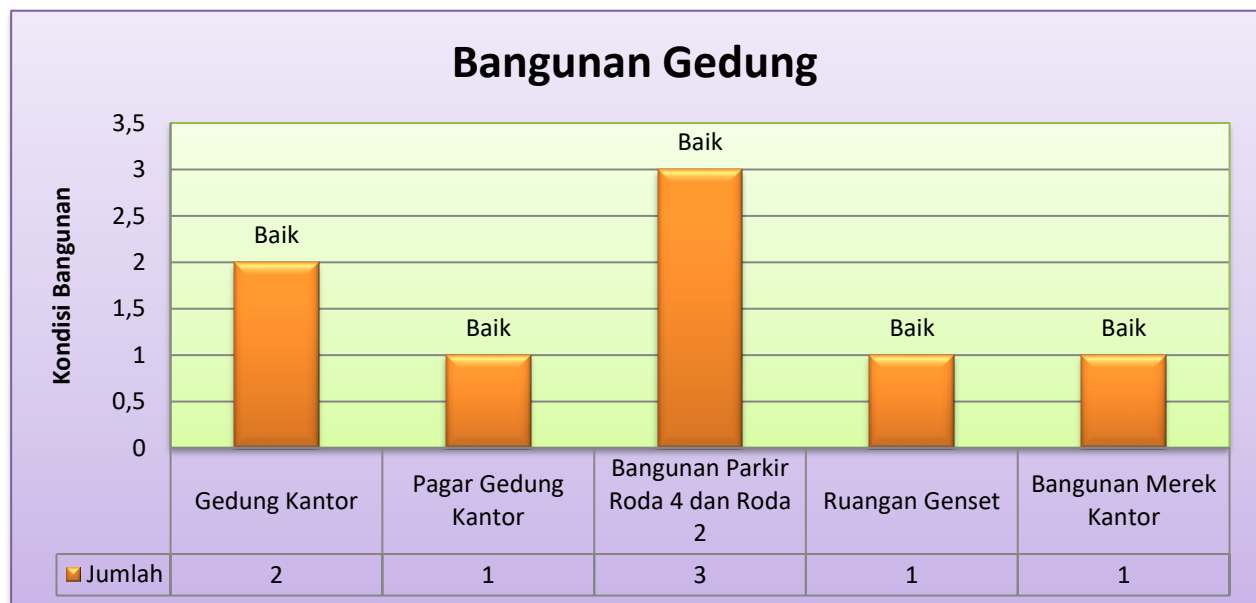
32.	Jalan khusus kantor	2	Baik
33.	Running teks	1	Baik
34.	Instalasi Jaringan Elektronik	1	Baik
35.	Lemari Es	1	Baik
C.	<u>KendaraanDinas</u>		
1.	Kendaraan Roda 4	3	Baik
2.	Kendaraan Roda 2	6	Baik

Sumber : KIB Bapedalitbang Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2022.

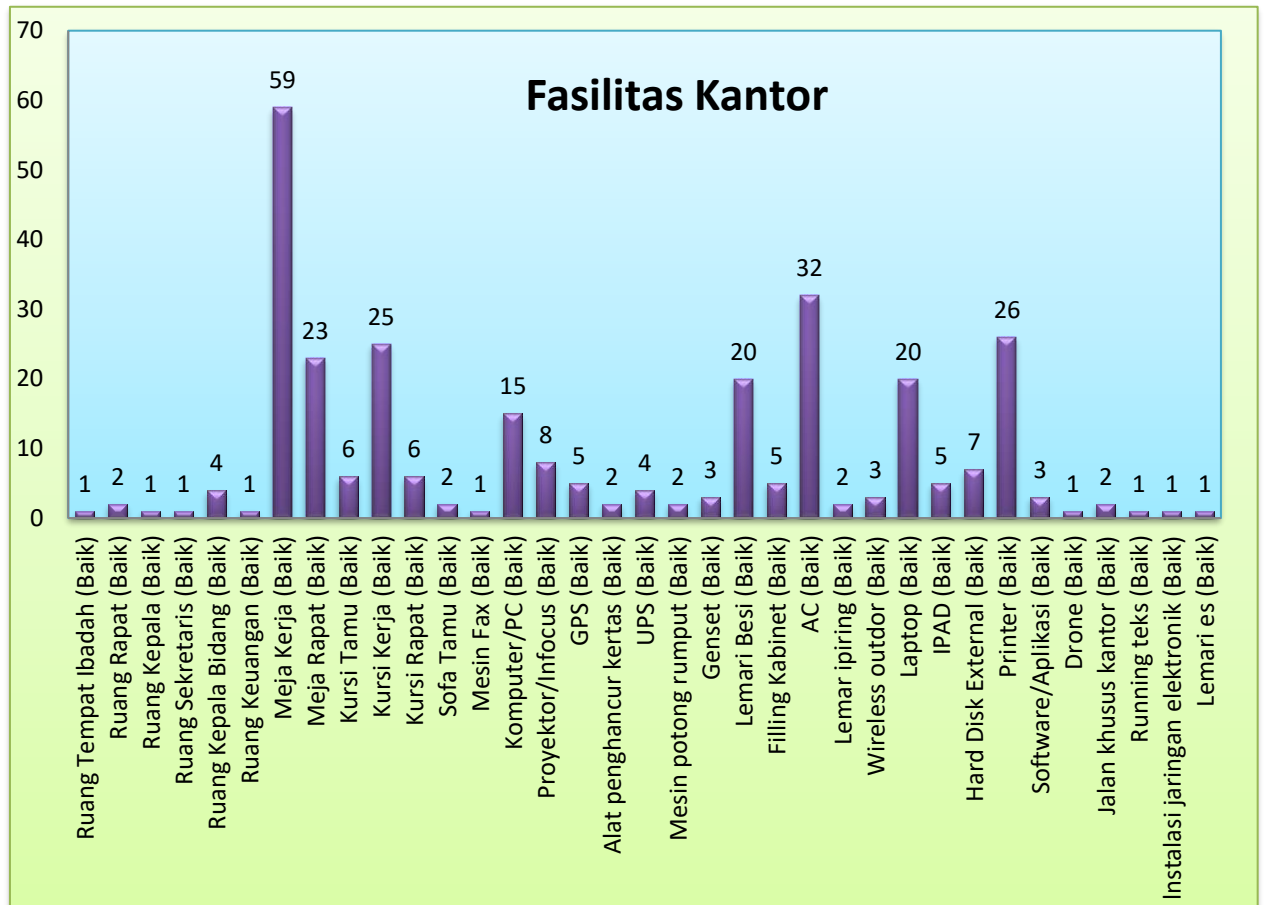
Grafik.1.4.

Komposisi Sarana dan Prasarana Penunjang
Badan Perencanaan Daerah, Penelitian dan Pengembangan

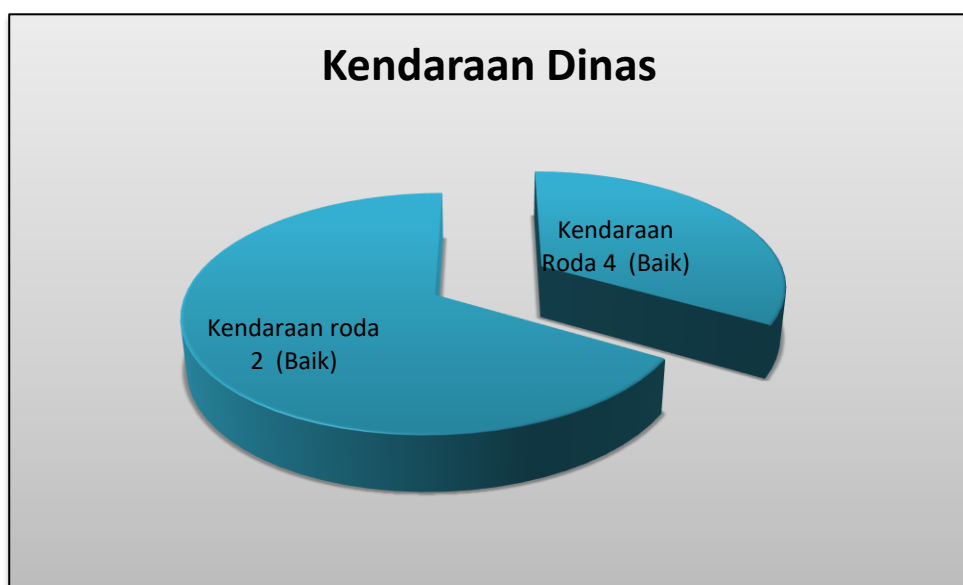
1.4.1 Bangunan Gedung



1.4.2 Fasilitas Kantor



1.4.3 Kendaraan Dinas



I.7 SISTEMATIKA PENYAJIAN

Pada dasarnya Laporan Kinerja (LKj) ini berisi pencapaian kinerja Badan Perencanaan Daerah, Penelitian dan Pengembangan (Bapedalitbang) Kabupaten Pesisir Selatan selama tahun 2022 tentang capaian kinerja (*performance results*) tahun 2022 yang diperbandingkan dengan Penetapan Kinerja/TAPKIN (*performance agreement*) Tahun 2022 sebagai tolok ukur keberhasilan tahunan organisasi.

Sistematika penyajian Laporan Kinerja (LKj) Bapedalitbang Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2022 adalah sebagai berikut:

1. Bab I – Pendahuluan, menjelaskan secara ringkas latar belakang, aspek strategis Bapedalitbang Kabupaten Pesisir selatan dan struktur organisasi serta tujuan penyusunan LKj
2. Bab II – Perencanaan dan dan Perjanjian Kinerja, menjelaskan Visi Misi Bupati yang didukung OPD, Tujuan dan Sasaran OPD, Indikator Kinerja Utama dan Perjanjian Kinerja OPD / Esselon II.
3. Bab III – Akuntabilitas Kinerja, menjelaskan analisis pencapaian kinerja Bapedalitbang Kabupaten Pesisir Selatan dikaitkan dengan pertanggungjawaban publik terhadap pencapaian sasaran strategis untuk tahun 2022.
4. Bab IV – Penutup, menjelaskan kesimpulan menyeluruh dari Laporan Akuntabilitas Kinerja Bapedalitbang Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2022 dan menguraikan rekomendasi yang diperlukan bagi perbaikan kinerja dimasa datang atau Tahun 2023.

BAB II

PERENCANAAN KINERJA DAN PERJANJIAN KINERJA

II.1 RENCANA STRATEGIS BADAN PERENCANAAN DAERAH, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN KABUPATEN PESISIR SELATAN 2021-2026

Perencanaan merupakan suatu langkah awal untuk melaksanakan suatu kegiatan dalam sistem Akuntabilitas kinerja Perangkat Daerah yang mengkaji lingkungan eksternal dan internal serta menganalisa faktor kecenderungan yang memengaruhi kinerja, merumuskan isu strategis yang harus dipecahkan. Efektifnya perencanaan strategis suatu Perangkat Daerah apabila rencana itu disusun secara inklusif yang berorientasi kepada perencanaan jangka panjang, jangka menengah, sehingga kita dapat menentukan bagaimana gambaran kinerja Perangkat Daerah sekarang, bagaimana gambaran kinerja Perangkat Daerah masa depan sehingga kita dapat mengambil suatu keputusan, tindakan yang menuntun kinerja Perangkat Daerah dalam upaya mencapai gambaran kinerja Perangkat Daerah masa depan dalam jangka waktu tertentu.

Badan Perencanaan Daerah, Penelitian dan Pengembangan (Bapedalitbang) sebagai lembaga teknis yang mempunyai tugas pokok dan fungsi dalam perumusan perencanaan pembangunan daerah memiliki peran dan fungsi strategis dalam perencanaan, pelaksanaan dan pengendalian pembangunan. Dalam menjalankan tugas pokok dan fungsi sesuai dengan kewenangannya, diperlukan suatu perencanaan strategis melalui Penelaahan Visi dan Misi serta cara Pencapaian tujuan sasaran yang telah ditetapkan.

Dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2021-2026 yang telah disahkan dan ditetapkan dengan Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 4 tahun 2021 memuat Visi Kabupaten Pesisir Selatan, yaitu ***“Mewujudkan Pesisir Selatan lebih sejahtera, maju dan***

bermartabat, didukung pemerintahan yang akuntabel dan profesional dengan enam misi yang mendukungnya.

Dari keenam misi Kabupaten Pesisir Selatan, maka **misi pertama** adalah misi yang sesuai dengan Badan Perencanaan Daerah, Penelitian dan Pengembangan. Misi I tersebut adalah “Memperkuat Tata Kelola Pemerintahan yang bersih, efektif, demokratis dan transparan”

Dari Visi dan Misi pertama Kabupaten Pesisir Selatan tersebut, maka tujuan yang harus dilaksanakan Badan Perencanaan Daerah, Penelitian dan Pengembangan Kabupaten Pesisir Selatan adalah sebagai berikut :

Tabel 2.1.
Tujuan-Sasaran-Indikator

VISI : Mewujudkan Pesisir Selatan lebih sejahtera, maju dan bermartabat, didukung pemerintahan yang akuntabel dan profesional			
Misi	Tujuan	Sasaran	Indikator
1	2	3	4
Memperkuat Tata Kelola Pemerintahan yang bersih, efektif, demokratis dan transparan	1. Terwujudnya Perencanaan Pembangunan yang berkualitas	1.Meningkatnya Kualitas Dokumen Perencanaan pembangunan	1. Peningkatan nilai SAKIP pada komponen perencanaan kinerja
		2.Terwujudnya kebijakan pembangunan sesuai dengan kebutuhan pembangunan	2. Persentase kebijakan pembangunan yang searah dengan sasaran RPJMD 3. Indeks Inovasi Daerah 4. Inovasi Bapedalitbang
		5.Meningkatnya akuntabilitas kinerja	5. Hasil penilaian AKIP Bapedalitbang

		Bapedalitbang	oleh Inspektorat
--	--	---------------	------------------

Sumber: Renstra Bapedalitbang Kabupaten Pesisir Selatan 2021-2026

II.2 PERJANJIAN KINERJA

Perjanjian kinerja merupakan proses penyusunan rencana kinerja sebagai penjabaran dari sasaran dan program yang telah ditetapkan dalam rencana strategis, yang akan dilaksanakan oleh instansi Pemerintah melalui berbagai kegiatan tahunan. Didalam rencana kinerja ditetapkan rencana capaian kinerja tahunan untuk seluruh indikator kinerja yang ada pada tingkat sasaran dan kegiatan. Dokumen Perjanjian Kinerja Badan Perencanaan Daerah, Penelitian dan Pengembangan Tahun 2022 yang telah ditetapkan berpedoman pada RPJMD Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2021-2026, Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2022, Renstra, serta Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2022. Perjanjian kinerja Bapedalitbang Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2022 dapat dilihat pada tabel 2.2.

Tabel 2.2
Perjanjian Kinerja Bapedalitbang Kab.Pessel Tahun 2022

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target
1.	Meningkatnya Kualitas Dokumen Perencanaan pembangunan	Peningkatan nilai SAKIP pada komponen perencanaan kinerja	25
2.	Terwujudnya kebijakan pembangunan sesuai dengan kebutuhan pembangunan	Persentase kebijakan pembangunan yang searah dengan sasaran RPJMD	89,5%
		Indeks Inovasi Daerah	60,02 (sangat inovatif)
		Inovasi Bapedalitbang	1
3.	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Bapedalitbang	Hasil Penilaian AKIP Bapedalitbang oleh Inspektorat	A

Sumber: Renstra Bapedalitbang Kabupaten Pesisir Selatan, 2021-2026.

II.3 INDIKATOR KINERJA UTAMA

Salah satu upaya untuk memperkuat akuntabilitas dalam penerapan tata pemerintahan yang baik, maka Badan Perencanaan Daerah, Penelitian dan Pengembangan Kabupaten Pesisir Selatan telah menetapkan Indikator Kinerja Utama (IKU) secara berjenjang, sebagai ukuran keberhasilan organisasi dalam mencapai tujuan dan sasaran strategis organisasi. Indikator Kinerja Utama ditetapkan dengan memilih indikator- indikator kinerja yang ada dalam renstra Badan Perencanaan Daerah, Penelitian dan Pengembangan Kabupaten Pesisir Selatan, serta RPJMD Tahun 2021 – 2026.

Tabel 2.3

No	sasaran strategis	Indikator sasaran	Formula	Satuan	Target
1	2	3	7	8	9
1	Meningkatnya kualitas dokumen perencanaan pembangunan	Peningkatan nilai SAKIP pada komponen perencanaan kinerja	Hasil evaluasi KemenPANRB tentang SAKIP pada komponen perencanaan	nilai	25
2	Terwujudnya kebijakan pembangunan sesuai dengan kebutuhan pembangunan	Persentase kebijakan pembangunan yang searah dengan sasaran RPJMD	$\frac{\text{Jml Kebijakan pembangunan yang searah dengan sasaran RPJMD}}{\text{total kebijakan pembangunan}} \times 100$	Persentase	89,5
		Indeks Inovasi Daerah	Hasil Penilaian Kemendagri	Tanpa Satuan	60,02 (sangat inovatif)
		Inovasi Bapedalitbang	Jumlah Inovasi		1
3	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Bapedalitbang	Hasil Penilaian AKIP Bapedalitbang oleh Inspektorat	Nilai AKIP Bapedalitbang	nilai	A

Sumber : Renstra Bapedalitbang 2021-2026

BAB III

AKUNTABILITAS KINERJA

Badan Perencanaan Daerah, Penelitian dan Pengembangan Kabupaten Pesisir Selatan sebagai suatu lembaga perencanaan pembangunan daerah melaksanakan kewajiban berakuntabilitas melalui laporan kinerja instansi Pemerintah yang memberikan penilaian tingkat pencapaian target masing-masing indikator sasaran strategis yang telah ditetapkan. Akuntabilitas kinerja ini mencakup 3 (tiga) sasaran strategis dengan 5 (lima) indikator kinerja.

III.1 METODOLOGI PENILAIAN CAPAIAN TARGET KINERJA BADAN PERENCANAAN DAERAH, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN KABUPATEN PESISIR SELATAN

Akuntabilitas kinerja adalah kewajiban untuk menyampaikan pertanggungjawaban atau untuk menjawab dan menerangkan kinerja atau tindakan seseorang/badan hukum/ pimpinan kolektif organisasi secara transparan berkaitan dengan tingkat pencapaian sasaran ataupun tujuan sebagai penjabaran visi, misi, strategi organisasi kepada pihak yang memiliki hak atau yang berwenang menerima laporan.

Pengukuran Kinerja adalah pengukuran capaian target kinerja kelompok indikator kinerja sasaran strategis yang ditetapkan dalam dokumen Perjanjian Kinerja Badan Perencanaan Daerah, Penelitian dan Pengembangan tahun 2022. Metode pengukuran kinerja yang digunakan adalah metode pengukuran sederhana dengan membandingkan target kinerja dengan realisasi kinerja kelompok indikator kinerja sasaran strategis. Hasil pengukuran dan capaian indikator kinerja dimaksud, digunakan untuk menilai keberhasilan/kegagalan pencapaian sasaran strategis dalam rangka mewujudkan visi dan misi Pemerintah Daerah Kabupaten Pesisir Selatan serta analisis penyebab keberhasilan/kegagalan capaian target indikator kinerja yang ditetapkan.

Pengukuran kinerja dilakukan dengan menetapkan indikator terlebih dahulu. Indikator yang digunakan oleh Badan Perencanaan Daerah, Penelitian dan Pengembangan Kabupaten Pesisir Selatan untuk mengukur kinerja badan adalah :

1. Masukan (*inputs*) adalah sesuatu yang dibutuhkan agar pelaksanaan kegiatan dan program dapat berjalan atau dalam rangka menghasilkan outputs, seperti dana, material, waktu, teknologi dan sebagainya.
2. Keluaran (*outputs*) adalah segala sesuatu berupa produk/jasa (fisik dan atau non fisik) sebagai hasil langsung dari pelaksanaan suatu kegiatan dan program berdasarkan masukan yang digunakan.
3. Hasil (*outcomes*) adalah segala sesuatu yang mencerminkan berfungsinya keluaran kegiatan pada jangka menengah (efek langsung). Hasil merupakan ukuran seberapa jauh setiap produk/jasa dapat memenuhi kebutuhan dan harapan masyarakat.

Dalam penyusunan Laporan Kinerja Tahun 2022, belum dapat dijelaskan secara baik indikator manfaat (*benefit*) dan dampak (*impact*) karena laporan Kinerja ini merupakan laporan antara dan bukan laporan akhir dari pelaksanaan RENSTRA, sehingga indikator yang digunakan lebih banyak pada indikator input, output dan outcomes.

Pengukuran kinerja dilakukan dengan membandingkan target dan realisasi. Apabila semakin tinggi realisasi menunjukkan pencapaian kinerja yang semakin baik atau semakin rendah realisasi menunjukkan pencapaian kinerja yang semakin jelek, dengan menggunakan rumus sebagai berikut :

$$\text{Capaian Indikator Kinerja} = (\text{Realisasi/Rencana}) \times 100 \%$$

Pengukuran kinerja dilakukan dengan menggunakan indikator kinerja pada level sasaran dan kegiatan. Pengukuran dengan menggunakan indikator kinerja pada level sasaran digunakan untuk menunjukkan secara langsung kaitan antara sasaran dengan indikator

kinerjanya, sehingga keberhasilan sasaran berdasarkan rencana kinerja tahunan yang ditetapkan dapat dilihat dengan jelas.

Untuk penilaian keberhasilan/kegagalan pencapaian sasaran strategis dan keberhasilan/kegagalan capaian indikator kinerja, ditetapkan kategori penilaian keberhasilan/kegagalan sebagaimana tercantum pada tabel 3.1.

Tabel 3.1.
Klasifikasi Penilaian dan Kategori Penilaian Keberhasilan/Kegagalan
Pencapaian Sasaran Strategis dan Capaian Indikator Kinerja
Tahun 2022

No.	Klasifikasi Penilaian	Predikat
1.	85% - 100%	Sangat Baik
2.	69% - 84 %	Baik
3.	53% - 68%	Cukup
4.	< 53%	Gagal

III.2 HASIL PENGUKURAN KINERJA

Hasil pengukuran capaian target indikator kinerja utama dan sasaran strategis yang ditetapkan dalam dokumen Perjanjian Kinerja Badan Perencanaan Daerah, Penelitian dan Pengembangan dapat dilihat pada tabel 3.2

Tabel 3.2
Hasil Pengukuran Perjanjian Kinerja Badan Perencanaan Daerah,
Penelitian dan Pengembangan
Tahun 2022

NO ·	MISI/TUJUAN DAN SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	SATUA N	2022			
				TARGE T	REALISAS I	CAPAIA N	
MISI 1 : Memperkuat Tata Kelola Pemerintahan yang bersih, efektif, demokratis dan transparan							
Tujuan : 1. Terwujudnya perencanaan pembangunan yang berkualitas							
1.	Meningkatnya Kulaitas Dokumen Perencanaan pembangunan	1.	Peningkatan nilai SAKIP pada komponen perencanaan kinerja	Nilai	25	25 *	100 *
2.	Terwujudnya kebijakan pembangunan sesuai dengan kebutuhan pembangunan	1.	Persentase kebijakan pembangunan yang searah dengan sasaran RPJMD	%	89,5	100	111,73
		2.	Indeks Inovasi Daerah	Tanpa Satuan	60,02 (sangat Inovasti f)	60,02*	100*
		3.	Inovasi Bapedalitbang	Jumlah	1	1	100
3	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Bapedalitbang	1.	Hasil Penilaian AKIP Bapedalitbang oleh Inspektorat	Nilai	A	A *	A *

* Nilai masih sementara

III.3 CAPAIAN KINERJA BADAN PERENCANAAN DAERAH, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN KABUPATEN PESISIR SELATAN

Badan Perencanaan Daerah, Penelitian dan Pengembangan Kabupaten Pesisir Selatan, dalam capaian kinerjanya mengemban misi-I yang tertuang dalam RPJMD Kabupaten Pesisir Selatan 2021 – 2026 yakni : Memperkuat Tata Kelola Pemerintahan yang bersih, efektif, demokratis dan transparan.

Misi pertama ini memuat beberapa kata kunci yaitu: (1) Membangun transparansi dan akuntabilitas kinerja pemerintahan, (2) Meningkatkan kapasitas dan profesionalitas aparatur, (3) Meningkatkan partisipasi publik dalam proses pengambilan kebijakan publik. Hal ini lahir dari adanya tuntutan kebutuhan masyarakat akan layanan birokrasi yang bersih, berkinerja tinggi dan pelayanan publik yang berkualitas.

Membangun transparansi dan akuntabilitas kinerja yang dimaksud dalam misi ini yaitu adanya saluran-saluran yang terbuka bagi masyarakat untuk berpartisipasi, mengawasi dan memberi umpan balik terhadap setiap proses penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan. Kondisi ini ditandai dengan terwujudnya sistem pelaporan dan kinerja instansi pemerintahan, peningkatan akses publik terhadap informasi kinerja instansi pemerintah, makin efektifnya penerapan e-government untuk mendukung *open government* pada seluruh instansi pemerintah daerah.

Berdasarkan indikator kinerja Badan Perencanaan Daerah, Penelitian dan Pengembangan maka dapat dilihat penyajian analisis capaian kinerja per sasaran strategis untuk mewujudkan misi yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan sebagai berikut :

Sasaran 1
Meningkatnya kualitas Dokumen Perencanaan pembangunan

Sasaran ini memiliki 1 (satu) Indikator kinerja yakni: Peningkatan nilai SAKIP pada komponen perencanaan kinerja.

Tabel 3.3
Capaian Kinerja Sasaran 1 : Meningkatnya kualitas dokumen perencanaan pembangunan Tahun 2022

No	Indikator Kinerja	Satuan	Target	Realisasi	Capaian
1	Peningkatan nilai SAKIP pada komponen perencanaan kinerja	Nilai	25	25 *	100 *

Sumber : Nilai SAKIP Menpan RB

* Nilai sementara (tahun 2022)

* Nilai belum ada dari Kemenpan RB

1. Peningkatan nilai SAKIP pada komponen perencanaan kinerja

Sistem manajemen pemerintahan berfokus pada peningkatan akuntabilitas dan sekaligus peningkatan kinerja yang berorientasi pada hasil (*outcome*) dikenal sebagai SAKIP. Implementasi SAKIP pada instansi pemerintah meliputi perencanaan, pelaksanaan, pengukuran, dan pemantauan kinerja serta pelaporan kinerja kepada instansi yang lebih tinggi. Evaluasi SAKIP adalah aktivitas analisis yang sistematis, pemberian nilai, atribut, apresiasi, dan pengenalan masalah, serta pemberian solusi atas masalah yang ditemukan untuk tujuan peningkatan kinerja dan akuntabilitas unit kerja. Pada Badan Perencanaan Daerah, Penelitian dan Pengembangan salah satu penilaian indikator sasaran strategisnya adalah berdasarkan peningkatan nilai

SAKIP pada komponen perencanaan kinerja. Pada komponen perencanaan ini nilai tertingginya adalah berbobot 30.

Adapun Komponen Penilaian SAKIP pada komponen perencanaan dapat dilihat pada tabel berikut ini :

Komponen Penilaian SAKIP		
Komponen	Bobot	Sub Komponen
Perencanaan Kinerja	30%	1. Perencanaan Strategis (10%), meliputi : a. Pemenuhan Rencana Strategis (2%) b. Kualitas Rencana Strategis (5%) c. Implementasi Rencana Strategis (3%) 2. Perencanaan Kinerja Tahunan (20%), meliputi: a. Pemenuhan Perencanaan Kinerja Tahunan (4%) b. Kualitas Perencanaan Kinerja Tahunan (10%) c. Implementasi Perencanaan Kinerja Tahunan (6%)

Adapun predikat penilaian SAKIP adalah sebagai berikut:

No.	Kategori	Nilai Angka	Interpretasi
1.	AA	> 90 – 100	Sangat memuaskan
2.	A	> 80 – 90	Memuaskan : Memimpin perubahan, berkinerja tinggi, dan sangat akuntabel
3.	BB	> 70 – 80	Sangat baik : Akuntabel, berkinerja baik,

			memiliki sistem manajemen kinerja andal
4.	B	> 60 – 70	Baik : Akuntabilitas kinerjanya sudah baik, memiliki sistem yang dapat digunakan untuk manajemen kinerja, dan perlu sedikit perbaikan
5.	CC	> 60 – 60	Cukup (memadai) : Akuntabilitas kinerjanya cukup baik, taat kebijakan, memiliki sistem yang dapat digunakan untuk memproduksi informasi kinerja untuk pertanggungjawaban, perlu banyak perbaikan tidak mendasar.
6.	C	> 30 – 50	Kurang : Sistem dan tatanan kurang dapat diandalkan, memiliki sistem untuk manajemen kinerja tapi perlu banyak perbaikan minor dan perbaikan yang mendasar
7.	D	0 – 30	Sangat Kurang : Sistem dan tatanan tidak dapat diandalkan untuk penerapan manajemen kinerja; perlu banyak perbaikan, sebagian perubahan yang sangat mendasar.

Keberhasilan Sasaran Strategis I ini, didorong oleh :

- a Peningkatan kompetensi perencana OPD.
- b Peningkatan koordinasi antar perangkat daerah dalam penyusunan dokumen perencanaan pembangunan.
- c Peningkatan manajemen data dan informasi pembangunan.

Kelemahan dari Sasaran strategis I ini adalah :

- a. Kurangnya motivasi aparaturnya untuk meningkatkan kapasitas.
- b. Manajemen data dan informasi serta pengarsipan dokumen perencanaan yang masih lemah
- c. Kurangnya pemahaman aparaturnya tentang perencanaan pembangunan sektoral dan kewilayahan.

Pemecahan masalah untuk kelemahan Strategis I diatas adalah :

- a. Penyediaan anggaran bintek/ pelatihan bagi aparaturnya perencana.
- b. Mengoptimalkan pemanfaatan data dan adanya kesepahaman dari pemangku kepentingan data yang akan dipakai dalam proses perencanaan.



Tabel 3.4
Realisasi dan Capaian Indikator kinerja Peningkatan nilai SAKIP pada
komponen perencanaan kinerja Tahun 2020-2022

No	Indikator Kinerja	Satuan	Realisasi			Capaian		
			2020	2021	2022	2020	2021	2021
1	Peningkatan nilai SAKIP pada komponen perencanaan kinerja	Nilai	21,96	24,11	25*	-	104,82%	100*

Nilai tahun 2022 belum ada dari Kemenpan RB

Dari tabel 3.4 menggambarkan bahwa peningkatan nilai SAKIP pada komponen perencanaan kinerja tahun 2020-2022 adalah dari segi realisasinya nilai SAKIP pada komponen perencanaan kinerja ini mengalami peningkatan yaitu dari nilai 21,96 pada tahun 2020 naik menjadi 24,11 pada tahun 2021 tapi untuk tahun 2022 nilainya belum ada karena belum menerima data nilai dari Kemenpan RB. Jika dihitung dari segi capaiannya, untuk tahun 2020 dan tahun 2021 tidak bisa dihitung karena pada tahun 2020 tidak memakai nilai SAKIP untuk indikator kinerja sasaran.

Program – program yang telah dilaksanakan untuk mendukung pencapaian target indikator kinerja sasaran strategis peningkatan nilai SAKIP pada komponen perencanaan kinerja antara lain dapat dilihat pada table berikut ini:

Tabel 3.5
Program yang mendukung pencapaian target indikator kinerja yang di tetapkan

No	Program	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	Tingkat Capaian (%)
1.	Program perencanaan, pengendalian dan evaluasi pembangunan daerah	351.466.990	285.065.530	81,11
2.	Program koordinasi dan sinkronisasi perencanaan pembangunan daerah	464.897.304	441.691.834	95,01
	Jumlah	816.364.294	726.757.364	89,02

Program – program diatas tersebut di dukung oleh dana sebesar Rp. 816.364.294,- terealisasi sebesar Rp.726.757.364,- atau 89,02%. Ini berarti dalam pelaksanaan program dan kegiatan tahun 2022 terdapat efisiensi anggaran sebesar 10,98 % atau Rp. 89.606.930,-

Sasaran 2

Terwujudnya kebijakan pembangunan sesuai dengan kebutuhan pembangunan

Indikator kinerja yang ditetapkan untuk mengukur keberhasilan pencapaian sasaran strategis no 2 ini memiliki 3 (tiga) indikator kinerja yaitu Persentase kebijakan pembangunan yang searah dengan sasaran RPJMD, Indeks Inovasi Daerah, Jumlah Inovasi Bapedalitbang. Pada tabel 3.6 dibawah ini dapat kita lihat keberhasilan capaian kinerjanya, yaitu:

Tabel 3.6
Capaian Kinerja Sasaran 2 : Persentase Kebijakan Pembangunan yang searah dengan Sasaran RPJMD, Indeks Inovasi Daerah dan Inovasi Bapedalitbang

No.	Indikator Kinerja	Satuan	Target	Realisasi	Capaian
1.	Persentase kebijakan pembangunan yang searah dengan sasaran RPJMD	%	89,5	100	111,73
2.	Indek Inovasi Daerah	Tanpa Satuan	60,02	60,02*	100*
3.	Inovasi Bapedalitbang	Jumlah	1	1	100
Rata-rata Capaian					103,91*

**Belum ada nilai dari Kemendagri (penilaian tahun 2023)*

2.1. Persentase Kebijakan Pembangunan yang Searah dengan Sasaran RPJMD

Dari tabel 3.6 diatas dapat dilihat rata-rata capaian indikator kinerja sasaran strategis sebesar **103,91%**. Pencapaian sasaran strategis 2 ini termasuk **Sangat Berhasil** dengan kategori **Sangat Baik**. Karena dari target Pertama yang ditetapkan 89,5% mampu direalisasikan melebihi target yakni sebesar 100% sehingga tingkat capaian indikator kinerja 2 pada indicator pertama ini sebesar **111,73%**.

Realisasi indikator kinerja ini diukur berdasarkan Persentase kebijakan pembangunan yang searah dengan sasaran RPJMD dengan sumber data diperoleh dari RKPD tahun yang bersangkutan dengan RPJMD. Persentase ini dihitung dengan menjumlahkan dan mencocokkan seluruh kebijakan pembangunan yang searah dengan sasaran RPJMD dibagi total kebijakan pembangunan yang ada. Formulasi Persentase kebijakan pembangunan yang searah dengan sasaran RPJMD adalah sebagai berikut :

$$\frac{\text{Jml kebijakan pembangunan yang searah dengan sasaran RPJMD}}{\text{total kebijakan pembangunan}} \times 100$$

Semua kebijakan sudah searah dengan sasaran RPJMD dan ditindaklanjuti ke dalam program pembangunan. Persentase kebijakan pembangunan yang searah dengan sasaran RPJMD sebagaimana formula operasional diatas adalah **100%** atau dikategorikan **sangat baik** .

Keberhasilan Sasaran Strategis 2 ini, didorong oleh :

- a Peningkatan kompetensi Aparatur perencanaan.
- b Peningkatan koordinasi antar perangkat daerah dalam penyusunan dokumen perencanaan pembangunan.

c. Peningkatan manajemen data dan informasi pembangunan.

Sedangkan kelemahan dari Sasaran strategis 3 ini adalah :

- a. Kurangnya motivasi aparaturnya untuk meningkatkan kapasitas.
- b. Manajemen data dan informasi serta pengarsipan dokumen perencanaan yang masih lemah
- c. Kurang optimalnya pemakaian SI oleh aparaturnya perencanaan.

Pemecahan masalah untuk kelemahan Strategis 3 diatas adalah :

- a. Penyediaan anggaran bintek/ pelatihan bagi aparaturnya perencanaan.
- b. Koordinasi antar OPD lebih intensif.
- c. Mengoptimalkan pemanfaatan data dan peningkatan penggunaan Sistim Informasi.

Berikut kami tampilkan tabel Persentase kebijakan pembangunan yang searah dengan sasaran RPJMD.

Tabel 3.7
Kebijakan Pembangunan yang searah dengan Sasaran RPJMD

No	Arah Kebijakan	Sasaran RPJMD
1	Peningkatan nilai tambah dan daya saing sektor unggulan dengan Pengembangan 10 Kawasan secara Holistik-Tematik	Terwujudnya Pemerintahan yang Akuntabel dan Kinerja.
2	Penurunan angka kemiskinan dan pemerataan kesejahteraan	Meningkatnya Kapabilitas Birokrasi
3	Penyediaan infrastruktur mendukung perekonomian, pariwisata dan peningkatan SDM	Meningkatnya Keterbukaan Informasi dan Pelayanan Publik
4	Terus melakukan revitalisasi pasar rakyat di beberapa kecamatan	Meningkatnya Kualitas Kesehatan Masyarakat
5	Kemudahan investasi, Amenitas pariwisata, ekonomi kreatif	Meningkatnya Perlindungan Kesehatan Masyarakat
6	Focus pembangunan industri dan pariwisata	Meningkatnya Perlindungan Sosial Masyarakat
7		Meningkatnya Kemampuan Ekonomi Masyarakat Miskin dan Rentan Miskin
8		Meningkatkan Investasi Penanaman Modal Asing dan Penanaman Modal Dalam Negeri
9		Meningkatnya PDRB Sektor Unggulan
10		Menurunkan Pengangguran
11		Terpenuhinya Kebutuhan Infrastruktur Penunjang Ekonomi Unggulan
12		Terjaminnya Kelestarian Lingkungan
13		Pesisir Selatan Menjadi Tujuan Wisata Favorit di Pantai Barat Indonesia
14		Berkembangnya Ekonomi Kreatif
15		Meningkatnya Akses Layanan Bidang Pendidikan
16		Meningkatnya daya saing Pendidikan
17		Meningkatnya Pengamalan Nilai-Nilai Agama Dalam Kehidupan Masyarakat
18		Meningkatnya Sumber Daya Manusia Kreatif dan Berdaya Saing
19		Terwujudnya Keluarga Bahagia
20		Meningkatnya Partisipasi Masyarakat Dalam Pembangunan dan Menjaga Lingkungan Secara Mandiri

$$\text{Persentase keselarasan kebijakan terhadap sasaran RPJMD} = \frac{6}{6} \times 100\%$$

$$\text{Persentase keselarasan kebijakan terhadap sasaran RPJMD} = 100\%$$

Dari tabel 3.7 diatas dapat dijelaskan bahwa ada 6 kebijakan yang searah dengan sasaran RPJMD. Hal ini menunjukkan seluruh kebijakan tersebut searah dengan sasaran RPJMD.

2.2 Indeks Inovasi Daerah

Pada indicator kinerja kedua dari Sasaran strategis kedua ini adalah Indeks Inovasi Daerah. Dari target yang telah ditetapkan, realisasi optimis akan dicapai sesuai target yaitu 60,02. Namun Indeks Inovasi Daerah tersebut belum bernilai karena belum dilakukan penilaian oleh Kementerian Dalam Negeri.

2.3 Inovasi Bapedalitbang

Untuk Indikator Kinerja ketiga yaitu Inovasi Bapedalitbang, target telah dicapai dengan realisasi 100 %. Hal ini dilihat dari target yaitu jumlah inovasi minimal 1 inovasi. Pada tahun 2022 Bapedalitbang memiliki inovasi yang disebut Poliklinik Inovasi yang berfungsi sebagai wadah untuk melakukan Coaching kepada setiap OPD di kabupaten Pesisir Selatan dalam rangka menyusun inovasi sesuai yang ditentukan oleh Kementerian Dalam Nagari sehingga dapat dilakukan penginputan untuk dilakukan penilaian dengan nilai kematangan maksimal, sehingga akan meningkatkan Indeks Inovasi Daerah.

Untuk pengukuran kinerja dibandingkan tahun sebelumnya kami tampilkan tabel Realisasi dan capaian indikator kinerja Persentase kebijakan pembangunan yang searah dengan sasaran RPJMD tahun 2020-2022 :

Tabel 3.8**Realisasi dan Capaian Indikator Kinerja Persentase Kebijakan pembangunan yang searah dengan sasaran RPJMD Tahun 2020-2022.**

No.	Indikator Kinerja	Satuan	Realisasi			Capaian		
			2020	2021	2022	2020	2021	2022
1.	Persentase kebijakan pembangunan yang searah dengan sasaran RPJMD	%	90	100	100	100	114,94	111,73
2.	Indeks Inovasi Daerah	Tanpa Satuan	-	-	60,02*	-	-	100*
3.	Inovasi Bapedalitbang		-	-	1	-	-	100

Indikator persentase kebijakan pembangunan yang searah dengan sasaran RPJMD, Indeks Inovasi Daerah dan Inovasi Bapedalitbang merupakan indikator yang dilaksanakan dalam mencapai sasaran strategis. Dari tabel 3.8 menunjukkan bahwa realisasi kebijakan pembangunan yang searah dengan sasaran RPJMD Tahun 2020-2021 dapat dijalankan dengan baik dan lancar. Bahkan untuk tahun 2022 capaian kinerja dari persentase kebijakan pembangunan yang searah dengan sasaran RPJMD mencapai 111,73% atau kategori **sangat baik**. Sementara indikator kedua yaitu Indeks Inovasi Daerah merupakan indikator baru pada tahun 2022 yang nilai indeks tersebut dikeluarkan oleh Kementerian Dalam Negeri setelah dilakukan penilaian pada tahun 2023 dalam kata lain belum dilakukan penilaian. Terakhir, indikator ketiga yaitu inovasi Bapedalitbang merupakan indikator baru juga pada tahun 2022 yaitu jumlah minimal inovasi yang harus dipenuhi oleh Bapedalitbang yaitu 1 inovasi yang kemudian terpenuhi secara sempurna dengan capaian 100%.

Pencapaian sasaran strategis kedua ini dengan 3 indikator diatas didukung oleh program sebagai berikut :

Tabel 3.9
Program yang mendukung pencapaian target indikator kinerja yang di tetapkan

No	Program	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	Tingkat Capaian (%)
1.	Program Penelitian dan Pengembangan Daerah	448.505.138,-	417.874.800,-	93,17
	Jumlah	448.505.138,-	417.874.800,-	93,17

Pagu anggaran untuk mendukung sasaran strategis 2 ini sebesar Rp. 448.505.138,- yang terealisasi sebesar Rp. 417.874.800,- atau 93,17%. Persentase realisasi keuangan tidak mencapai 100% hal ini disebabkan silpa berupa operasional kegiatan, Walaupun demikian hal ini tidak mengurangi arti output kegiatan atau terjadi efisiensi anggaran.

Sasaran 3 Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Bapedalitbang

Indikator kinerja yang ditetapkan untuk mengukur keberhasilan pencapaian sasaran strategis 3 terdiri dari 1 (satu) indikator kinerja, dengan capaian kinerja sebagaimana tercantum pada tabel berikut ini:

Tabel 3.10
Capaian Indikator Kinerja Sasaran Strategis 3

No.	Indikator Kinerja	Satuan	Target	Realisasi	Capaian
1.	Hasil Penilaian AKIP Bapedalitbang oleh Inspektorat	Kategori	A	A*	A*
Rata-rata Capaian					*

* Nilai sementara (tahun 2022)

Capaian dari indikator kinerja ini belum bisa dihitung karena hasil realisasinya belum keluar dari Inspektorat.

3. Hasil Penilaian AKIP Bapedalitbang oleh Inspektorat

Dari tabel 3.10 dapat dilihat rata-rata capaian indikator kinerja sasaran strategis sebesar **100%**. Pencapaian sasaran strategis 3. termasuk **Sangat Berhasil** dengan kategori **Sangat Baik**. Karena dari target yang ditetapkan A mampu direalisasikan sesuai target yakni A sehingga tingkat capaian indikator kinerja 3 ini sebesar **100%**.

Realisasi indikator kinerja ini diukur berdasarkan hasil penilaian AKIP oleh Inspektorat yang dalam proses evaluasi akuntabilitas kinerja

menggunakan teknik “*criteria referenced survey*” dengan cara menilai secara bertahap langkah demi langkah setiap komponen dan selanjutnya menilai secara keseluruhan dengan criteria evaluasi dari masing- masing komponen yang telah ditetapkan.

Aspek yang dinilai dalam evaluasi : **Tabel 3.11**

No.	Komponen	Bobot	Nilai capaian
1.	Perencanaan Kinerja	30 %	*
2.	Pengukuran Kinerja	30 %	*
3.	Pelaporan Kinerja	15 %	*
4.	Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal	25 %	*
Total		100 %	*

Dari uraian tabel diatas dapat dilihat nilai capaian yang diperoleh oleh Badan Perencanaan Daerah Penelitian dan Pengembangan Kabupaten Pesisir Selatan adalah sebesar * dengan Kategori *

No.	Kategori	Nilai Angka	Interpretasi
1.	AA	> 90 – 100	Sangat memuaskan
2.	A	> 80 – 90	Memuaskan : Memimpin perubahan, berkinerja tinggi, dan sangat akuntabel
3.	BB	> 70 – 80	Sangat baik : Akuntabel, berkinerja baik, memiliki sistem manajemen kinerja andal
4.	B	> 60 – 70	Baik : Akuntabilitas kinerjanya sudah baik, memiliki sistem yang dapat digunakan untuk manajemen

			kinerja, dan perlu sedikit perbaikan
5.	CC	> 60 – 60	Cukup (memadai) : Akuntabilitas kinerjanya cukup baik, taat kebijakan, memiliki sistem yang dapat digunakan untuk memproduksi informasi kinerja untuk pertanggungjawaban, perlu banyak perbaikan tidak mendasar.
6.	C	> 30 – 50	Kurang : Sistem dan tatanan kurang dapat diandalkan, memiliki sistem untuk manajemen kinerja tapi perlu banyak perbaikan minor dan perbaikan yang mendasar
7.	D	0 – 30	Sangat Kurang : Sistem dan tatanan tidak dapat diandalkan untuk penerapan manajemen kinerja; perlu banyak perbaikan, sebagian perubahan yang sangat mendasar.

Tabel 3.12**Realisasi dan Capaian Indikator Kinerja Hasil Penilaian AKIP
Bapedalitbang oleh Inspektorat Tahun 2020-2022.**

No.	Indikator Kinerja	Satuan	Realisasi			Capaian		
			2020	2021	2022	2020	2021	2022
1.	Hasil Penilaian AKIP Bapedalitbang oleh Inspektorat	Nilai	A	A	A*	100	100	A*

* Nilai sementara (tahun 2022)

Indikator Hasil Penilaian AKIP Bapedalitbang oleh Inspektorat merupakan salah satu indikator yang dilaksanakan dalam mencapai sasaran strategis. Dari tabel 3.12 diatas menunjukkan bahwa realisasi Penilaian AKIP Bapedalitbang Tahun 2020-2021 dapat dijalankan dengan baik dan lancar. Tapi untuk tahun 2022 capaian belum bisa dihitung karena nilai realisasi belum diterima dari Inspektorat. Hasil Penilaian AKIP Bapedalitbang oleh Inspektorat didukung oleh program sebagai berikut :

Tabel 3.13**Program yang mendukung pencapaian target indikator kinerja yang di tetapkan**

No	Program	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	Tingkat Capaian (%)
1.	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kab/kota	5.385.321.667,-	5.217.599.120,-	96,89
	Jumlah	5.385.321.667,-	5.217.599.120,-	96,89

Pagu anggaran untuk mendukung sasaran strategis 3 ini sebesar Rp. 5.385.321.667,- yang terealisasi sebesar Rp. 5.217.599.120,- atau 96,89%.

III.4 AKUNTABILITAS KEUANGAN

Anggaran dan realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Badan Perencanaan Daerah, Penelitian dan Pengembangan (Bapedalitbang) Kabupaten Pesisir Selatan Tahun Anggaran 2022 untuk pelaksanaan program dan kegiatan yang menunjang pencapaian 3 (tiga) sasaran strategis yang ditetapkan dalam Perjanjian Kinerja Kepala Badan Perencanaan Daerah, Penelitian dan Pengembangan (Bapedalitbang) Kabupaten Pesisir Selatan, tercantum pada tabel 3.14.

Tabel 3.14
Anggaran dan Realisasi Anggaran
Yang Menunjang Sasaran Strategis Tahun 2022

No	Sasaran Strategis	Tahun 2022		
		Anggaran	Realisasi	Capaian
1	2	3	4	5
1	Meningkatnya Kualitas Dokumen Perencanaan pembangunan	816.364.294	726.757.364	89,02
2	Terwujudnya kebijakan pembangunan sesuai dengan kebutuhan pembangunan	448.505.138,-	417.874.800,-	93,17
3	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Bapedalitbang	5.385.321.667,-	5.217.599.120,-	96,89
	Total	6.650.194.099,-	6.362.231.284,-	95,67

Sumber : Laporan Perkembangan Realisasi Program/Kegiatan Tahun 2022.

Dari tabel 3.14 diatas dapat dijelaskan bahwa plafon anggaran yang disediakan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2022 untuk menunjang pencapaian 3 (tiga) sasaran strategis yang ditetapkan dalam Perjanjian Kinerja Bapedalitbang Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2022 sebesar Rp.6.650.194.099,- terealisasi sebesar Rp.6.362.231.284,- atau 95,67%. Dalam pelaksanaan program / kegiatan yang menunjang pencapaian 3 (tiga) sasaran strategis mencerminkan efisiensi pelaksanaan program kegiatan tanpa mengurangi fisik kegiatan yang menunjang pencapaian sasaran strategis yang ditetapkan.

BAB IV

PENUTUP

IV.1 KESIMPULAN

Berdasarkan hasil analisa kinerja pada Bab III, Capaian Kinerja Badan Perencanaan Daerah, Penelitian dan Pengembangan Kabupaten Pesisir Selatan tahun 2022, yaitu:

1. Capaian Sasaran

Dari 3 (tiga) sasaran yang telah ditetapkan, maka sasaran ' Terwujudnya kebijakan pembangunan yang sesuai dengan kebutuhan pembangunan mempunyai caapaian melebihi target yang ditetapkan yaitu 103,91% dengan klasifikasi capaian sangat baik. Untuk dua sasaran lainnya belum bisa dihitung capaiannya karena nilai realisasinya belum keluar dari pihak yang berwenang untuk memberikan penilaian.

2. Capaian Indikator Kinerja

Dari 5 (tiga) indikator kinerja yang telah ditetapkan, sebanyak 3 (dua) indikator kinerja belum bisa dilihat tingkat capaiannya karena nilai dari indikator tersebut belum keluar dari pihak KemenPan RB, Kemendagri dan Inspektorat. Sedangkan untuk indikator Persentase kebijakan pembangunan yang searah dengan sasaran RPJMD nilai capaian 111,73% dan Inovasi Bapedalitbang 100%.

3. Capaian Realisasi Anggaran Dalam Mendukung Pencapaian Sasaran

Belanja Badan Perencanaan Daerah, Penelitian dan Pengembangan pada tahun 2022 terealisasi sebesar Rp. 6.362.231.284 atau 95,67% dari target alokasi sebesar Rp. 6.650.194.099,-. Dari 3 (tiga) sasaran strategis, capaian anggaran belanja sasaran strategis tertinggi adalah “Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Bapedalitbang” yaitu 96,89% dan terendah adalah “Meningkatnya Kualitas Dokumen Perencanaan pembangunan” yaitu 89,02%.

IV.2 SARAN

Untuk mempertahankan dan meningkatkan pencapaian, kinerja dan realisasi anggaran, maka dilakukan upaya-upaya, antara lain:

- a Peningkatan pelaksanaan tugas pokok dan fungsi kearah yang lebih baik walaupun belum seperti yang diharapkan, tapi telah sesuai dengan program dan kegiatan yang direncanakan.
- b Perlunya peningkatan sumber daya manusia perencana dan peneliti untuk meningkatkan kompetensi aparatur perencana.
- c Penyempurnaan Sistim Informasi dalam pelaksanaan tugas (terintegrasinya aplikasi e-Planning, e Budgeting dan e-Monev).
- d Kendala dan masalah yang di hadapi pada tahun 2022 dapat dijadikan cermin untuk antisipasi pada tahun – tahun berikutnya.

Painan, 22 Februari 2023

Kepala Badan Perencanaan Daerah,
Penelitian dan Pengembangan



HADI SUSILO, S.STP, M.Si
NIP. 19770522 199703 1 001

LAMPIRAN

1. Prestasi tahun 2022

Penghargaan yang diterima oleh Badan Perencanaan Daerah, Penelitian dan Pengembangan tahun 2022

Penghargaan PENGUKURAN INDEKS PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH KABUPATEN DAN KOTA SE-SUMATERA BARAT TAHUN ANGGARAN 2021 TERBAIK I TINGKAT KABUPATEN SE SUMATERA BARAT KLASER KEUANGAN RENDAH SKOR 77,2975 NILAI **A**. Diterima di Padang pada bulan Desember 2022. Penghargaan ini diberikan oleh Pemerintah Provinsi Sumatera Barat.

